



Panduan Pendanaan Iklim

untuk COP26, CMP16, CMA3, SBI52-55, SBSTA52-55 Glasgow

Panduan Pendanaan Iklim

untuk COP26, CMP16, CMA3, SBI52-55,
SBSTA52-55 Glasgow

15 Oktober 2021

Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID)

Jakarta, INDONESIA

Tentang Panduan Ini

Paduan ini memberikan gambaran mengenai isu-isu pendanaan iklim yang dibahas di negosiasi perubahan iklim UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*), beserta latar belakang dan tujuannya. Panduan ini dapat digunakan oleh publik, terkait isu pendanaan iklim di *Conference of the Parties (COP) 26*, *Conference of the Parties serving as Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP) 16*, *Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement (CMA) 3*, serta *Subsidiary Body for Implementation (SBI)* dan *Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA) 52-55*, yang akan berlangsung pada tanggal 31 Oktober-12 November 2021 di Glasgow, Inggris, mendatang.

Sebagian dan/atau keseluruhan dari Panduan Pendanaan Iklim di Negosiasi Perubahan Iklim ini dapat dikutip dan/atau diperbanyak dan/atau digunakan oleh siapapun seluas-luasnya dengan biaya Rp 0,- (nol rupiah), sepanjang tidak untuk digunakan kepentingan bisnis, proyek (swasta maupun pemerintah), ataupun bentuk kapitalisasi lainnya. Siapapun yang menggunakan sebagian/keseluruhan Panduan ini wajib menuliskan/menyebutkan sumbernya dengan lengkap. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Panduan Pendanaan Iklim di Negosiasi Perubahan Iklim dilindungi oleh Undang-Undang dan/atau perjanjian internasional terkait.

Panduan Pendanaan Iklim

untuk COP26, CMP16, CMA3, SBI52-55, SBSTA52-55 Glasgow



Daftar Isi

Daftar Isi	i		
A. Pengantar	2		
B. Latar Belakang Isu-Isu Pembahasan Pendanaan Iklim di Negosiasi	10		
B.1 <i>Long Term Finance (LTF)</i>	11		
B.1.1 Lokakarya LTF	12		
B.1.2 <i>High-Level Ministerial Dialogue on Climate Finance</i>	21		
B.2 <i>Standing Committee on Finance</i>	21		
B.2.1 <i>Biennial Assessment 2020</i>	23		
B.2.2 <i>Needs of Developing Countries Report</i>	28		
B.3 Review Ketujuh dari Mekanisme Pendanaan Konvensi (<i>Seventh review of the financial mechanism</i>)	31		
B.4 <i>New Collective Quantified Goal</i>	32		
B.5 <i>Article 9.5 of the Paris Agreement (Ex-Ante Information)</i>	34		
B.5.1 Rangkuman Laporan Sintesis Submisi Dua Tahunan Informasi <i>Ex-Ante</i>	35		
		B.5.2 Lokakarya Artikel 9.5	41
		B.6 <i>Adaptation Fund</i>	44
		B.6.1 <i>Fourth Review of the Adaptation Fund</i>	46
		B.6.2 <i>Membership of the Adaptation Fund Board</i>	47
		B.6.3 Laporan dari <i>Adaptation Fund Board (AFB)</i>	48
		B.7 <i>Global Environment Facility (GEF)</i>	51
		B.7.1 Perkembangan dari GEF	52
		B.8 <i>Green Climate Fund (GCF)</i>	53
		B.8.1 Perkembangan GCF	54
		B.9 Keterkaitan Pendanaan Iklim Dengan Agenda Lain	56
		B.9.1 Artikel 6 Persetujuan Paris	56
		B.9.2 <i>Loss and Damage</i>	57
		B.9.3 Kerangka Transparansi (<i>Transparency Framework</i>)	58
		C. Tautan Dokumen Pendukung, Agenda Pembahasan Negosiasi Pendanaan Iklim	60

A. Pengantar



“
Pendanaan iklim berperan penting untuk mewujudkan dan memastikan keberlanjutan implementasi aksi-aksi perubahan iklim.
”

Pendanaan iklim merupakan salah satu isu negosiasi perubahan iklim yang memiliki peranan penting untuk melakukan implementasi aksi-aksi perubahan iklim baik di tingkat sub-nasional, nasional, maupun global. Hampir di seluruh Konferensi Para Pihak untuk Konvensi Perubahan Iklim (*Conference of Parties* yang biasa disebut dengan COP) yang dilaksanakan setiap tahun, agenda pendanaan iklim memiliki jumlah agenda terbanyak, dikarenakan isu yang dibahas juga sangat luas. Misalnya, isu pendanaan iklim harus membahas mengenai besaran pendanaan yang harus dimobilisasi, serta diperlukan untuk memungkinkan tercapainya tujuan tertinggi dari Konvensi Perubahan Iklim. Agenda lain yang dibahas juga terkait dengan arahan yang diberikan oleh Para Pihak kepada entitas operasional (*operating entities*) pelaksana mekanisme pendanaan iklim. Masih banyak lagi isu yang dibahas terkait dengan pendanaan iklim, dan seluruh isu memiliki keterkaitan satu sama yang lain. Itu sebabnya, *Indonesia Research Institute for Decarbonization* (IRID) menyusun panduan ini, untuk memberikan gambaran isu pendanaan iklim dalam konteks negosiasi perubahan iklim, secara spesifik di COP26. Panduan ini juga dilengkapi dengan sejarah singkat dari masing-masing isu yang akan dibahas dari COP26 Glasgow, mendatang.

COP26 sendiri memegang peranan yang sangat penting, di mana pada COP ini, diharapkan seluruh perangkat yang diperlukan agar Persetujuan Paris dapat diimplementasikan dengan baik, sudah disepakati dan tersedia. Persetujuan Paris diharapkan dapat memasuki masa operasionalnya di awal tahun 2021 dan seterusnya.

Selain itu, terkait dengan isu pendanaan iklim, COP26 masih harus menindaklanjuti isu-isu krusial, yang teridentifikasi di COP25 Madrid, di akhir tahun 2019 yang lalu. COP25 yang lalu masih meninggalkan isu long-term finance, yang dikenakan Rule 16 dari prosedur UNFCCC, di mana isu yang dibahas tidak mencapai kata kesepakatan, sehingga pada pembahasan berikutnya, akan membahas hal yang sama dari titik awal.

Sesi negosiasi perubahan iklim yang akan berlangsung di Glasgow mendatang, terdiri dari lima bagian, yaitu COP26, CMP16, CMA3, SBSTA 52-

55 dan SBI 52-55. Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai kelima sesi negosiasi tersebut.

Conference of the Parties

Agenda COP26
Agenda 8: <i>Matters relating to Finance</i>
(a) <i>Long-Term Finance</i>
(b) <i>Matters relating to the Standing Committee on Finance</i> (i) <i>Report of the Standing Committee on Finance</i> (ii) <i>First report on the determination of the needs of developing country Parties related to implementing the Convention and the Paris Agreement</i> (iii) <i>Fourth (2020) Biennial Assessment and Overview of Climate Finance Flows</i> (iv) <i>Review of the functions of the Standing Committee on Finance</i>
(c) <i>Report of the Green Climate Fund to the Conference of the Parties and guidance to the Green Climate Fund (for 2020 and 2021)</i>
(d) <i>Matters relating to the Adaptation Fund</i>
(e) <i>Seventh Review of Financial Mechanism</i>
(f) <i>Compilation and synthesis of, and summary report on the in-session workshop on, biennial communications of information related to Article 9 paragraph 5, of the Paris Agreement</i>

Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim atau *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) atau lebih sering disebut Konvensi, merupakan perjanjian multilateral yang lahir pada Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (*Earth Summit*) di Rio de Janeiro, 1992. KTT Rio telah menandai kesadaran global untuk mengatasi berbagai masalah yang mengancam kelestarian lingkungan dan mengurangi kemampuan negara untuk memenuhi kesejahteraan rakyatnya. Konvensi berkekuatan hukum dan secara efektif dilaksanakan sejak 21 Maret 1994. Di dalam Konvensi terdapat juga *Conference of the Parties* atau COP yang merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi untuk Para Pihak Konvensi (UNFCCC). COP akan meninjau implementasi Konvensi serta berbagai instrumen hukum lainnya yang telah diadopsi. COP juga akan mengambil keputusan untuk meningkatkan efektivitas implementasi Konvensi baik dari sisi pengaturan kelembagaan maupun administratif. COP memiliki anggota sebanyak 197 Pihak, yakni

196 negara dan satu Uni Eropa.

COP melakukan pertemuan setiap tahun, kecuali jika Para Pihak memutuskan hal lain. Pertemuan COP pertama diselenggarakan di Berlin, Jerman pada bulan Maret 1995.

Guna memfasilitasi ketersediaan pendanaan iklim dalam konteks implementasi dari Konvensi, telah ditetapkan mekanisme pendanaan (*financial mechanism*) untuk menyediakan sumber daya keuangan dalam bentuk hibah atau pinjaman lunak (*concessional*), termasuk untuk melaksanakan transfer teknologi. Mekanisme pendanaan iklim sendiri terdapat pada Pasal 11 Konvensi. Pasal-pasal lain di dalam Konvensi yang terkait dengan isu pendanaan iklim adalah Pasal 4 mengenai *Commitments*, terutama Pasal 4.3, Pasal 4.4, Pasal 4.5 dan Pasal 4.7.

Conference of the Parties serving as Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP)

Agenda CMP16
Agenda 7: <i>Matters relating to the Adaptation Fund</i>
(a) <i>Report of the Adaptation Fund Board (for 2020 and 2021)</i>
(b) <i>Fourth review of the Adaptation Fund</i>

Pada COP3 Kyoto tahun 1997, Para Pihak menyatakan pentingnya bagi negara maju untuk mengimplementasikan Pasal 17 dari Konvensi, terkait dengan pengurangan emisi gas rumah kaca oleh negara maju. Bersamaan dengan itu, Para Pihak sepakat untuk mengadopsi Protokol Kyoto. Protokol Kyoto kemudian

efektif diimplementasikan terhitung pada tanggal 16 Februari 2005. Forum pengambilan keputusan tertinggi untuk Para Pihak Protokol Kyoto disebut *Conference of the Parties serving as Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP)*. Berbeda dengan Konvensi, CMP memiliki anggota dengan total 192 Pihak, yakni 191 negara dan satu Uni Eropa. CMP mengawasi implementasi Protokol Kyoto dan juga mengambil keputusan untuk meningkatkan efektivitas dari implementasi Protokol Kyoto.

CMP melakukan pertemuan setiap tahun bersamaan dengan pertemuan COP. Para Pihak dari Konvensi yang bukan merupakan bagian dari Pihak Protokol Kyoto dapat berpartisipasi dalam CMP namun hanya sebagai pengamat (*observer*), dan tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan. Pertemuan CMP pertama diselenggarakan di Montreal, Kanada pada bulan Desember 2005, bersamaan dengan sesi COP11.

Protokol Kyoto sendiri memiliki dua periode komitmen. Periode Komitmen I Protokol Kyoto berlangsung dari 1 Januari 2008 hingga 31 Desember 2012. Protokol Kyoto periode pertama memberikan kewajiban target dan penurunan emisi GRK untuk periode 2008-2012 kepada negara-negara yang tercantum di dalam *Annex B* dari Protokol tersebut. Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) yang masuk dalam perhitungan target dan penurunan yang harus dilakukan, tercantum di dalam *Annex A* dari Protokol Kyoto. Periode komitmen kedua (*second commitment period*) Protokol Kyoto terhitung dari tanggal 1 Januari 2013 hingga 31 Desember 2020. Pada periode komitmen kedua, terdapat perubahan target *Annex B* serta jenis dan jumlah gas dalam *Annex A*.

Pendanaan yang dibentuk di bawah Protokol Kyoto adalah **Adaptation Fund**. Adaptation Fund dibentuk guna membiayai proyek dan program adaptasi nyata di negara-negara berkembang, yang merupakan Para Pihak dari Protokol Kyoto. **Adaptation Fund** sendiri secara resmi diluncurkan pada tahun 2007 pada CMP3 di Bali, meskipun telah dibentuk oleh COP7 tahun 2001 di Marrakesh, Maroko. **Adaptation Fund** dikelola oleh *Adaptation Fund Board (AFB)* dan memiliki sekretariat yang memfasilitasi penelitian, konsultan, administrasi serta berbagai layanan lainnya untuk AFB. Penjelasan lebih rinci mengenai **Adaptation Fund** akan diulas pada bab berikutnya.

Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement (CMA)

Agenda CMA3
Agenda 8: <i>Matters relating to Finance</i>
(a) <i>Matters relating to the Standing Committee on Finance</i>
(i) <i>Report of the Standing Committee on Finance</i>
(ii) <i>First report on the determination of the needs of developing country Parties related to implementing the Convention and the Paris Agreement</i>

Selain komitmen Protokol Kyoto, terdapat komitmen lainnya yang dihasilkan oleh Para Pihak, yakni Persetujuan Paris. Persetujuan Paris merupakan komitmen Para Pihak pada UNFCCC untuk melakukan upaya bersama dalam mengatasi permasalahan perubahan iklim setelah berakhirnya komitmen negara maju dalam periode komitmen kedua Protokol Kyoto. Persetujuan Paris - yang

(iii) *Fourth (2020) Biennial Assessment and Overview of Climate Finance Flows*
(iv) *Review of the functions of the Standing Committee on Finance*

(b) *Guidance to the Green Climate Fund*

(c) *Guidance to the Global Environment Facility*

(d) *Matters relating to the Adaptation Fund*

(e) *New collective quantified goal on climate finance*

(f) *Compilation and synthesis of, and summary report on the in-session workshop on, biennial communications of information related to Article 9 paragraph 5, of the Paris Agreement*

secara internasional dikenal sebagai *Paris Agreement* - diadopsi oleh COP21 UNFCCC yang berlangsung di Paris tahun 2015 dan berkekuatan hukum sejak 4 November 2016. Forum pengambilan keputusan tertinggi untuk Para Pihak pada Persetujuan Paris adalah *Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement* (CMA). CMA akan mengawasi implementasi Persetujuan Paris dan juga mengambil keputusan guna mendukung implementasi yang efektif. Terkait dengan keanggotaan Para Pihak, CMA memiliki anggota dengan total 192 Pihak, yakni 191 negara dan satu Uni Eropa.

CMA melakukan pertemuan setiap tahun bersamaan dengan pertemuan COP. Para Pihak dari Konvensi yang bukan merupakan bagian dari Pihak Persetujuan Paris dapat berpartisipasi dalam CMA namun hanya sebagai pengamat, dan tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan. Pertemuan CMA pertama diselenggarakan di Marakesh, Maroko pada bulan November 2016, bersamaan dengan sesi COP22.

Persetujuan Paris sendiri menegaskan kembali kewajiban Para Pihak dari negara maju untuk menyediakan sumber pendanaan guna membantu Para Pihak negara berkembang, selain itu Persetujuan Paris juga mendorong kontribusi sukarela oleh Para Pihak lainnya.

Isu pendanaan di dalam Persetujuan Paris secara khusus tercantum di dalam Pasal 9, namun terdapat beberapa pasal lain dalam Persetujuan Paris, yang memiliki hubungan dengan isu pendanaan pendanaan iklim.

Subsidiary Body for Implementation (SBI) dan Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA)

Agenda SBSTA 52-55

Agenda 14: *Methodological issues under Paris Agreement*

(a) *Common tabular formats for the electronic reporting of the information on financial, technology development and transfer, and capacity building support provided and mobilized, as well as support needed and received, under Articles 9-11 of the Paris Agreement*

Agenda SBI 52-55

Agenda 7: *Matters relating to the Adaptation Fund*

(a) *Membership of the Adaptation Fund Board*

(b) *Fourth review of the Adaptation Fund*

Disamping COP, CMP dan CMA, terdapat pula badan-badan lain di bawah UNFCCC yang mendukung proses negosiasi di ketiga forum pengambilan keputusan tertinggi tersebut, yakni SBI dan SBSTA. *Subsidiary Body for Implementation* atau SBI, memiliki lingkup pekerjaan yang terkait dengan isu implementasi di bawah Konvensi, Protokol Kyoto, dan Persetujuan Paris. SBI menjalankan perannya dengan membahas agenda-agenda terkait untuk mempercepat implementasi dari semua perjanjian dan instrumen tersebut. Adapun agenda tersebut di antaranya transparansi, mitigasi, adaptasi, pendanaan, teknologi dan pengembangan kapasitas. SBI bertujuan untuk meningkatkan ambisi dari Para Pihak pada semua aspek agenda tersebut.

Sementara *Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice* atau SBSTA merupakan permanen subsidiary bodies yang dibentuk oleh COP atau CMP. SBSTA mendukung pekerjaan COP, CMP, dan CMA melalui penyediaan informasi dan juga memberikan masukan yang terkait dengan sisi ilmiah dan juga teknologi yang berkaitan dengan Konvensi, Protokol Kyoto dan Persetujuan Paris.

Bidang kerja utama SBSTA mencakup dampak, kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim; mempromosikan pengembangan dan alih

teknologi yang ramah lingkungan; serta melakukan pekerjaan teknis untuk meningkatkan pedoman guna mempersiapkan dan meninjau inventarisasi emisi gas rumah kaca dari Pihak *Annex-I*. SBSTA melakukan pekerjaan terkait dengan metodologi di bawah Konvensi, Protokol Kyoto dan Persetujuan Paris, serta mendorong kolaborasi penelitian serta pengamatan sistematis untuk sistem iklim.

B. LATAR BELAKANG ISU-ISU PEMBAHASAN PENDANAAN IKLIM DI NEGOSIASI



B.1. Long-Term Finance (LTF)

Long-Term Finance (LTF) merupakan sebuah program kerja – yang juga adalah agenda negosiasi – yang bertujuan untuk mengawal pencapaian mobilisasi pendanaan iklim hingga USD 100 miliar hingga tahun 2020. Agenda ini merupakan hasil negosiasi Para Pihak melalui *Decision 1/CP.17* dan *Decision 2/CP.17* paragraf 126-132. Sebelumnya, Para Pihak mencoba untuk memobilisasi pendanaan melalui *Fast Start Finance* (FSF) sebesar USD 30 miliar untuk kurun waktu 3 tahun. Melalui pembelajaran tersebut, Para Pihak kemudian menyepakati untuk memobilisasi pendanaan hingga USD 100 miliar di tahun 2020.

LTF memiliki tiga elemen kunci selama periode 2014-2020, yaitu:

1. Submisi dari negara-negara maju (*developed countries*) setiap dua tahun sekali, mengenai pemutakhiran informasi dari negara maju terkait pendekatan dan strategi negara maju untuk meningkatkan pendanaan iklim;
2. Lokakarya tahunan yang diselenggarakan di setiap sesi perundingan, baik dalam sesi perundingan SBI/SBSTA maupun saat COP berlangsung;
3. Dialog tingkat Menteri terkait dengan pendanaan iklim, yang dilakukan setiap dua tahun sekali.

Pada COP25 di Madrid, isu *Long-Term Finance* hingga hari terakhir perundingan, tidak berujung pada konsensus baik dari negara-negara maju maupun negara-negara berkembang. Oleh karena itu, agenda ini dikenakan *Rules 16* oleh Presiden COP pada saat itu. Artinya, agenda *Long-Term Finance* secara otomatis akan dimasukkan kembali ke dalam agenda negosiasi perubahan iklim.

Hal yang menjadi latar belakang dari ketidaksepakatan antara negara maju dan berkembang adalah adanya tuntutan dari negara berkembang, untuk melanjutkan agenda *Long-Term Finance* di dalam perundingan COP.

Sedangkan, bagi negara maju, program kerja LTF seharusnya berakhir di tahun 2020, apabila diteruskan, maka agenda ini akan menduplikasi pekerjaan yang ada di agenda lainnya¹.

B.1.1. Lokakarya LTF

Pada COP24², Para Pihak meminta Sekretariat UNFCCC untuk menyelenggarakan lokakarya in-session di tahun 2019 dan tahun 2020, dengan fokus pembahasan:

- a. Efektivitas pendanaan iklim, termasuk hasil (*results*) dan dampak (*impacts*) dari pendanaan yang disediakan (*provided*) dan juga dimobilisasi (*mobilized*);
- b. Bagaimana pendanaan iklim yang ada berikut dukungan teknis yang diberikan kepada negara-negara berkembang untuk mendanai aksi-aksi adaptasi dan mitigasi, dapat berperan dalam menjaga kenaikan temperatur bumi rata-rata tidak melebihi 2°C di atas tingkat pre-industri, dan juga mengupayakan untuk membatasi kenaikan temperatur tidak lebih dari 1,5°C.

Penyelenggaraan lokakarya di tahun 2020 terbagi menjadi 2 bagian: bagian pertama dilakukan pada tanggal 27 November 2020. Sesi ini memaparkan status dari mobilisasi pendanaan dan juga penyampaian (*delivery*) dari pendanaan iklim serta pembelajaran dari periode LTF, yang akan dijajaki lebih jauh di bagian kedua. Beberapa studi kasus disajikan, meliputi pengalaman negara dan regional terkait dengan efektivitas dari pendanaan iklim, termasuk *results* dan *impacts* dari dukungan pendanaan dan teknis yang dimobilisasi dan disediakan untuk negara-negara berkembang, dalam melakukan aksi-aksi mitigasi dan adaptasi.

¹ IISD, *Earth Negotiation Bulletin* Vol. 12 No.775 (2019), <https://enb.iisd.org/climate/cop25/enb/>

² UNFCCC, *Decision CP24 Long-term climate finance paragraph 9 and 10*, accessed September 22, 2021, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop24_auv_10a%20LTF.pdf

B.1.1.1. Hasil Lokakarya LTF Pertama³

Lokakarya *long-term finance* (LTF) yang pertama setelah COP25, diadakan pada tanggal 27 November 2020 secara virtual. Sesuai dengan mandatnya berdasarkan *Decision COP24* terkait *long-term finance*, maka pembahasan dari lokakarya ini difokuskan pada efektivitas pendanaan iklim dilihat dari sisi hasil dan dampak, serta bagaimana dukungan pendanaan serta dukungan teknis yang diberikan kepada negara-negara berkembang dapat mendukung aksi-aksi mitigasi dan adaptasi negara berkembang, sehingga berkontribusi pada upaya-upaya pencegahan kenaikan temperatur rata-rata bumi mencapai 2°C atau bahkan 1,5°C.

Terdapat dua paparan yang disampaikan untuk memberikan gambaran terkait dengan pembahasan yang dilakukan. Paparan pertama adalah mengenai pandangan dari penyedia dan penerima pendanaan iklim dengan mengambil konteks *Decision 1/CP.16* paragraf 98 dan 99. Paparan kedua berasal dari para ahli, yang membagikan pandangan mereka terhadap 3 pertanyaan berikut:

1. Bagaimanakah status pendanaan iklim saat ini, dari sisi mobilisasi pendanaan serta penyaluran dana tersebut, dibandingkan dengan kondisi di tahun 2010 saat *Decision 1/CP.16* diadopsi?
2. Pengertian apa yang dapat ditarik terkait dengan efektivitas, hasil (*results*) dan dampak (*impacts*) dari pendanaan iklim yang telah dimobilisasi dan disalurkan?
3. Apa yang menjadi tantangan dan kesempatan yang muncul saat negara-negara berkembang mengakses dukungan pendanaan serta dukungan teknis untuk adaptasi dan mitigasi?

³ UNFCCC, *In-session workshop on long-term climate finance in 2020 (part I)*, diakses pada 22 September 2021, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/LTF_Part-I_Summary%20Report_0.pdf

Beberapa temuan kunci dari lokakarya tersebut, terkait dengan mobilisasi dan penyaluran USD 100 miliar adalah:

- a. Pendanaan untuk mitigasi masih mengambil bagian lebih dari dua per tiga dari total pendanaan iklim yang disediakan dan dimobilisasi. Sementara itu, pinjaman (*loan*) mengambil bagian terbesar dari pendanaan iklim publik yang disediakan dan dimobilisasi. Selain itu, negara-negara *middle-income* telah mendapatkan pendanaan lebih banyak dari pendanaan iklim yang disediakan dan telah dimobilisasi. Sedangkan pendanaan untuk adaptasi, sebagian besar telah diterima oleh negara-negara LDCs dan SIDS;
- b. Nilai pendanaan iklim bersih yang diterima oleh negara berkembang dapat diperkirakan kurang dari setengah yang telah dilaporkan oleh negara-negara maju, setelah dihitung dengan memberlakukan penyesuaian untuk *grant equivalence*.

Pada diskusi yang berlangsung, beberapa peserta juga mendiskusikan isu-isu berikut ini:

- a. Pentingnya penyediaan dukungan pendanaan iklim yang disesuaikan dengan kebutuhan, prioritas dan kondisi dari negara-negara berkembang tersebut;
- b. Perlu adanya tinjauan dari penyaluran target pendanaan iklim sebesar USD 100 miliar;
- c. Rendahnya ketersediaan pendanaan untuk adaptasi dan dana hibah;
- d. Adanya ketidakseimbangan antara pendanaan iklim yang diakses antara wilayah dan cara-cara yang diambil untuk mengatasi masalah ini;
- e. Peran pendanaan publik di dalam *crowding* investasi swasta untuk adaptasi dan mitigasi.

Hal lainnya yang juga ditekankan dalam diskusi adalah penyaluran USD 100 miliar – sebagaimana target pendanaan yang disepakati – akan memberikan sinyal politik bahwa komitmen yang dibuat di bawah Konvensi dan juga Persetujuan Paris akan terpenuhi.

Scene-Setting Presentations

Lokakarya LTF yang berlangsung pada tanggal 27 November 2020 yang lalu, menghadirkan dua narasumber untuk menyampaikan paparan pembuka terkait dengan pendanaan iklim dalam konteks LTF. Dua narasumber tersebut adalah Jane Ellis dari OECD serta Tracy Carty dari Oxfam.

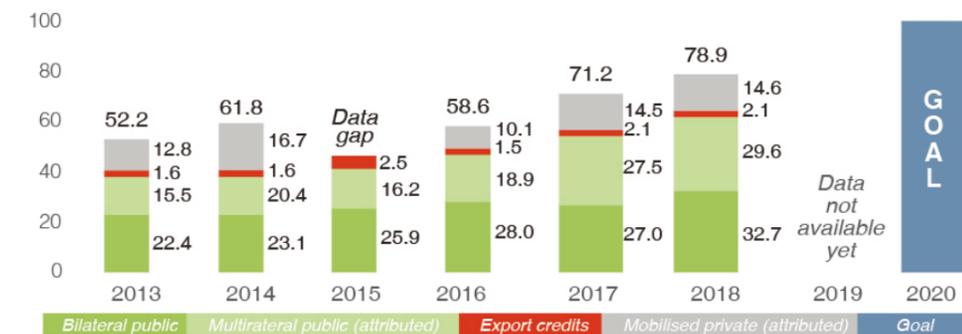
Perwakilan OECD menyampaikan laporan terkait dengan volume pendanaan iklim tahunan yang disediakan dan dimobilisasi oleh negara-negara maju kepada negara-negara berkembang di tahun 2013-2018. Beberapa hal yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- Total pendanaan iklim yang tersedia dan termobilisasi mencapai USD 78,9 miliar di tahun 2018, naik sebesar 11% dibandingkan tahun 2017;
- Pertumbuhan pendanaan iklim yang disediakan dan dimobilisasi disebabkan oleh pendanaan publik perubahan iklim, sedangkan dana swasta dan pendanaan kredit ekspor yang terkait dengan perubahan iklim, menunjukkan pertumbuhan yang kecil;
- Pendanaan iklim dari sumber publik yang disalurkan secara bilateral memberikan kontribusi terbesar dari total pendanaan iklim di tahun 2018, naik sekitar 21% dari tahun 2017;
- Dari total pendanaan iklim yang disediakan di tahun 2018 (USD 55 miliar), 70% untuk mitigasi dan 21% untuk adaptasi, dengan peningkatan pendanaan adaptasi sebesar 29% rata-rata per tahun selama periode 2016-2018 (sejumlah USD 16,8 miliar di tahun 2018);
- Pendanaan untuk isu-isu cross-cutting meningkat menjadi USD 7,1 miliar di tahun 2018 (meningkat 15% semenjak tahun 2016);
- Komposisi pinjaman dari total pendanaan publik untuk perubahan iklim yang disediakan meningkat dari 52% di tahun 2013 menjadi 74% di tahun 2018;
- Total, sebesar 93% pendanaan swasta perubahan iklim yang termobilisasi di tahun 2016-2018 diperuntukkan bagi mitigasi dan sebagian besar ditujukan pada negara-negara *middle-income*;

- LDCs dan SIDS menerima 14,2% dari total pendanaan iklim yang disediakan di tahun 2018.

Menurut OECD, diperlukan peningkatan tahunan rata-rata sebesar 13% untuk pendanaan iklim di tahun 2019 dan tahun 2020, untuk mencapai target pendanaan iklim sebesar USD 100 miliar di akhir tahun 2020, sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 1. Hal lain yang disampaikan oleh OECD adalah proses melakukan tracking pendanaan iklim untuk adaptasi, masih memiliki banyak tantangan.

Gambar 1. Pendanaan Iklim yang Tersedia dan Dimobilisasi pada Tahun 2013-2018



Sumber: OECD 2020. *Climate Finance Provided and Mobilized by Developed Countries in 2013-2018*. Paris: OECD Publishing. Available at: <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/f0773d55-en/1/3/1/index.html?itemId=/content/publication/f0773d55-en&csp=5026909c969925715cde6ea16f4854ee>

Paparan yang disampaikan oleh Oxfam disampaikan berdasarkan *assessment report* yang disusun oleh Oxfam terkait dengan kemajuan mobilisasi pendanaan sebesar USD 100 miliar. Oxfam menyatakan bahwa “bagaimana” (*how*) target pendanaan iklim dicapai, sama pentingnya dengan “jika” (*if*) target pendanaan tersebut tercapai. Terkait dengan hal tersebut, Oxfam menyampaikan, antara lain, isu-isu berikut ini:

- Nilai bersih finansial dari pendanaan iklim yang disediakan untuk negara-negara berkembang berkisar kurang dari setengah yang dilaporkan oleh negara-negara maju, setelah disesuaikan dengan nilai *grant equivalence*

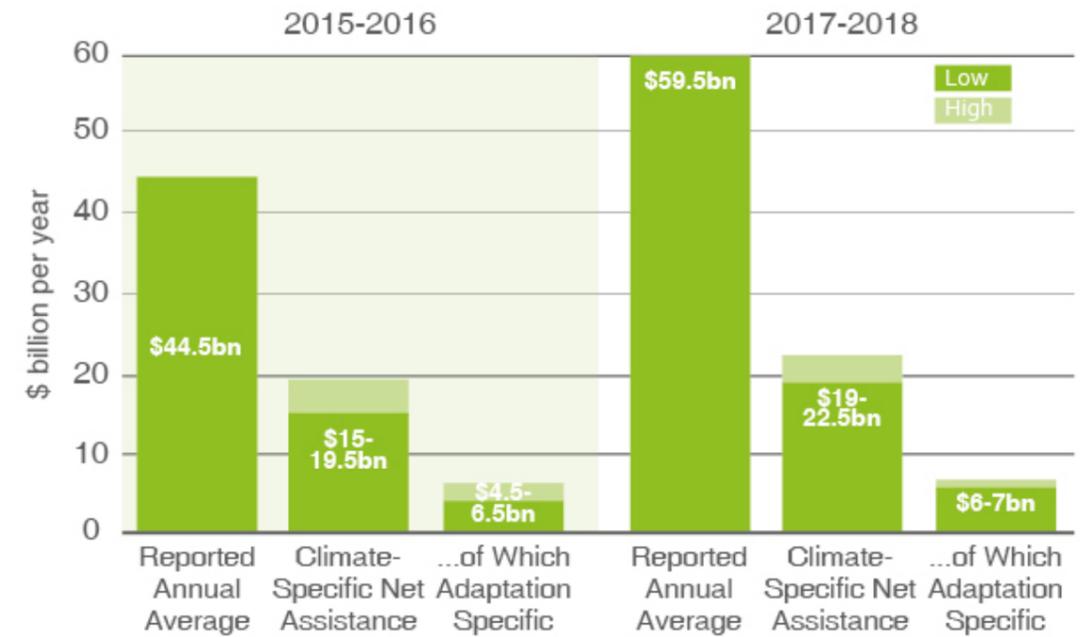
dan adanya *over-reporting* terkait dengan proyek-proyek yang terkait dengan perubahan iklim (lihat Gambar 2).

- b. Pinjaman dan instrumen non-hibah lainnya tercatat mencapai 80% dari pendanaan publik perubahan iklim yang dilaporkan, di mana hanya 40% dari seluruh nilai yang dilaporkan bersifat *non-concessional*.
- c. Terdapat ketidakseimbangan antara pendanaan untuk mitigasi dan adaptasi dengan estimasi 25% dari pendanaan publik yang dilaporkan untuk adaptasi dan 66% untuk mitigasi di rentang 2017-2018.

Pada diskusi terbuka yang berlangsung di dalam lokakarya tersebut, para peserta menyatakan perlunya untuk memperhitungkan paket pemulihan (*recovery package*) akibat pandemi Covid-19 dengan komitmen pendanaan iklim, serta membuat paket pemulihan tersebut menjadi lebih hijau, lebih inklusif dan tangguh (*resilient*). Beberapa peserta juga menyampaikan pandangan bahwa perlu adanya perbedaan yang jelas antara pendanaan iklim yang dimobilisasi dalam konteks USD 100 miliar dan yang berhubungan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Salah satu peserta, yang juga didukung oleh salah satu penyaji materi dan panelis, menyatakan bahwa pinjaman komersil, jaminan (*guarantees*) dan kredit ekspor tidak seharusnya diperhitungkan sebagai bagian dari pencapaian target pendanaan USD 100 miliar.

Terkait dengan efektivitas, hasil dan dampak dari pendanaan iklim, para panelis menyatakan bahwa efektivitas pendanaan iklim seharusnya ditinjau dari sejauh mana pendanaan tersebut dapat menghasilkan penurunan emisi atau memungkinkan dilakukannya adaptasi perubahan iklim. Para peserta juga memberikan catatan bahwa hingga saat ini, pendanaan untuk adaptasi, masih lebih rendah dari pendanaan mitigasi.

Gambar 2. Pendanaan Iklim yang Dilaporkan oleh Negara Maju Dibandingkan Estimasi Oxfam untuk Estimasi Dukungan Pendanaan Iklim



Sumber: Oxfam. 2020. *Climate Finance Shadow Report 2020: Assessing progress towards the \$100 billion commitment*. Oxford. Oxfam International Publishing. Available at: <https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621066/bp-climate-finance-shadow-report-2020-201020-en.pdf>

Bagian kedua dari lokakarya LTF dirancang untuk memfasilitasi adanya diskusi mendalam di antara para peserta. Metode pembagian kelompok kemudian diterapkan, setelah sesi plenary. Para peserta diharapkan untuk berbagi pandangan dan pengalaman serta menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang muncul.

B.1.1.2. Hasil lokakarya LTF kedua

Sampai tanggal 21 Oktober 2021, belum ada laporan resmi dari UNFCCC untuk *In-session Workshop on Long-term Climate Finance (Part II)*.

Penjelasan yang disampaikan disini merupakan hasil pengamatan melalui webcast dari portal UNFCCC.⁴

Lokakarya *long-term finance* yang kedua dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2021 secara virtual dan berlangsung dalam rangkaian acara *May June Climate Change Conference*. Pertemuan dibuka oleh Sekretariat UNFCCC dan juga *Chief Negotiator COP25. Co-Facilitator* dalam pertemuan ini adalah Zaheer Fakir (Afrika Selatan) dan Georg Borsting (Norwegia).

Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan sesi pembagian kelompok (*breakout group session*) yang diakhiri di *plenary session*. Setiap kelompok difasilitasi oleh seorang moderator, di mana masing-masing kelompok diharapkan untuk berdiskusi dengan menjawab tiga pertanyaan yang menjadi bahan diskusi di kelompok adalah:

1. Pelajaran penting apa yang dapat diambil dari penyediaan dan mobilisasi pendanaan iklim dalam 10 tahun terakhir?
2. Bagaimana penyediaan dan mobilisasi dukungan pendanaan dapat diselaraskan dengan, dan responsif terhadap kebutuhan negara-negara berkembang dan upaya-upaya apa yang sedang dilakukan untuk mencapai hal ini?
3. Bagaimana meningkatkan pendanaan adaptasi untuk mencapai keseimbangan antara dukungan untuk adaptasi dan mitigasi?

Pada diskusi yang berlangsung, terdapat beberapa hal yang diangkat oleh peserta untuk menanggapi pertanyaan tersebut, di antaranya:

⁴ UNFCCC, *In-session workshop on long-term climate finance in 2020 (part II)*, <https://www.youtube.com/watch?v=lbC7lnHgBqA>

- *Private finance* tertinggal perannya dalam pendanaan iklim;
- Beberapa hal yang diangkat negara berkembang dalam diskusi di antaranya adalah: (i) perlunya definisi *climate finance*; (ii) tantangan dalam mengakses pendanaan; (iii) *work programme* LTF harus dilanjutkan melampaui 2020 karena ini merupakan isu yang penting; (iv) perlunya pendanaan yang cukup untuk melakukan aksi iklim sehingga penting adanya penggandaan komitmen (*doubling commitment*) dari negara maju; (v) lokakarya LTF membahas dan mendiskusikan masalah perubahan iklim, namun tidak ada solusi nyata dari proses ini untuk membantu negara berkembang; dan (vi) diperlukan adanya kejelasan (*clarity*) dari status USD 100 miliar saat ini.
- Negara maju melihat perlu mengurangi investasi intensif karbon dan subsidi bahan bakar fosil untuk memastikan agar aliran dana dapat sesuai tempatnya. Selain itu negara maju mengangkat beberapa hal, seperti: (i) masalah pendanaan iklim ini merupakan masalah bersama semua Pihak karena semua berada di kapal yang sama, sehingga diharapkan untuk tidak melihat dari sisi *developed* dan *developing countries* saja; (ii) terkait dengan distribusi pendanaan iklim yang bergantung pada permintaan dari negara berkembang itu sendiri; dan (iii) menyambut baik ide terkait dengan pembelajaran dari USD 100 miliar.

Pertemuan ditutup oleh *Chief Negotiator of the COP 26 Presidency*, dengan menyampaikan beberapa poin berikut:

- Perlu meningkatkan upaya dalam pendanaan iklim;
- Penting melihat status USD 100 miliar saat ini;
- Meningkatkan akses pendanaan iklim adalah hal penting bagi negara berkembang;
- *COP Presidency* melihat bahwa pendanaan iklim merupakan isu yang penting dan *COP Presidency* akan membuat berbagai diskusi terkait, baik secara bilateral maupun multilateral untuk mendiskusikan hal ini.

B.1.2. High-Level Ministerial Dialogue on Climate Finance

Pada COP19 di Warsawa, Para Pihak menyetujui untuk mengadakan pertemuan dua tahunan berupa dialog tingkat menteri terkait dengan isu pendanaan iklim, dimulai pada tahun 2014, berakhir di 2020.

Pada COP24⁵, Para Pihak menyetujui bahwa penyelenggaraan biennial high-level ministerial dialogue mengenai pendanaan iklim, akan dilakukan pada tahun 2020, selaras dengan *Decision 3/CP.19. High level dialogue* ini akan mendapatkan informasi dari laporan lokakarya *in-session* di tahun 2019 dan 2020 tentang *long-term climate finance*, serta *Biennial Assessment and Overview of Climate Finance Flows 2020*.

B.2. Standing Committee on Finance

Hasil perundingan perubahan iklim di Cancun (COP16) – yang dikenal dengan *Cancun Agreement* – menyepakati dibentuknya *Standing Committee on Finance* (SCF), untuk memberikan masukan kepada COP terkait dengan mekanisme pendanaan iklim di bawah Konvensi. Hal-hal lebih rinci terkait dengan peran dan fungsi SCF, komposisi dan modalitas kerja, kemudian disepakati Para Pihak di COP17 di Durban.

Saat melaksanakan fungsinya, SCF dapat melakukan hal-hal di bawah ini:

1. Menyelenggarakan forum komunikasi di mana badan-badan dan entitas-entitas yang berkaitan dengan pendanaan iklim dapat bertukar informasi. Hal ini dilakukan dalam rangka melihat keterkaitan (*linkages*) dan memastikan keselarasan (*coherence*) antar isu;
2. Menjaga keterkaitan dengan *Subsidiary Body for Implementation* (SBI) dan badan-badan tematik dari Konvensi Perubahan Iklim;

⁵ UNFCCC, *IDecision COP24 Long-term climate finance paragraph 13*, accessed September 22, 2021, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cp24_auv_10a%20LTF.pdf

3. Menyediakan usulan arahan untuk *operating entities* dari mekanisme pendanaan iklim, kepada COP, dalam bentuk draft guidance. Usulan ini disusun dengan melihat dari sisi peningkatan konsistensi serta penerapan *guidance* yang diberikan. Sumber informasi yang digunakan sebagai dasar adalah laporan-laporan tahunan dari masing-masing *operating entity* serta masukan berupa submisi dari Para Pihak;
4. Membuat rekomendasi mengenai bagaimana meningkatkan keselarasan (*coherence*), efektivitas (*effectiveness*) dan efisiensi (*efficiency*) dari *operating entities* mekanisme pendanaan iklim;
5. Menyediakan input tenaga ahli, termasuk melalui tinjauan-tinjauan mandiri (*independent review*) dan *assessment*, ke dalam persiapan dan penyelenggaraan review berkala dari mekanisme pendanaan iklim, yang dilaksanakan oleh COP;
6. Mempersiapkan *Biennial Assessment*, serta pandangan menyeluruh terkait dengan aliran pendanaan iklim, dengan mempertimbangkan informasi terkait keseimbangan aliran pendanaan secara geografi dan tematik melalui sumber informasi yang ada. Sumber informasi tersebut termasuk *National Communications* dan *Biennial Reports* baik dari negara-negara maju maupun dari negara-negara berkembang. Informasi lainnya adalah informasi yang tercantum di *registry*, informasi dari Para Pihak terkait dengan tinjauan kebutuhan pendanaan, laporan-laporan yang disiapkan oleh *operating entities* dari mekanisme pendanaan, serta informasi yang tersedia dari entitas-entitas lain yang menyediakan pendanaan iklim;
7. SCF juga akan melakukan fungsi-fungsi lain yang mungkin ditugaskan kemudian oleh COP.

Terdapat beberapa pekerjaan SCF di atas yang harus selesai sebelum COP26 dan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut SCF telah melakukan beberapa kali pertemuan di tahun 2020 dan 2021 baik secara virtual maupun *hybrid*. Pertemuan terakhir yang dilaksanakan adalah *26th SCF Meeting* yang berlangsung pada tanggal 12-14 Oktober 2021.

Adapun beberapa pekerjaan yang diselesaikan dalam pertemuan tersebut mencakup:

1. *Fourth (2020) Biennial Assessment and Overview of Climate Finance Flows*, termasuk di dalamnya adalah informasi yang relevan dengan pencapaian Artikel 2.1c dari Persetujuan Paris;
2. *First report on the determination of the needs of developing country Parties* dalam mengimplementasikan Konvensi dan Persetujuan Paris;
3. *Draft guidance to the operating entities of the Financial Mechanism*; yang merupakan usulan arahan yang akan diberikan oleh COP dengan mempertimbangkan masukan dari SCF.

Diskusi yang berlangsung antara anggota SCF pada pertemuannya yang ke-26, menyatakan bahwa SCF telah menghasilkan elemen-elemen untuk menyusun *draft guidance* GCF. Walau demikian, pada pertemuan tersebut, tidak ada kata kesepakatan antar anggota, yang menyebabkan SCF tidak dapat memberikan usulan arahan untuk operating entities terutama untuk *Green Climate Funds*, untuk dipertimbangkan oleh COP, di COP26 mendatang.

B.2.1. Biennial Assessment 2020

Biennial Assessment merupakan sebuah dokumen yang memuat assessment dan overview dari aliran pendanaan iklim, yang dikumpulkan berdasarkan sumber-sumber informasi yang ada, termasuk informasi terkait dari aliran pendanaan berdasarkan lokasi serta keseimbangan alokasi. COP menugaskan SCF untuk menyusun dokumen ini setiap dua tahun sekali, untuk memberikan masukan bagi COP terkait dengan keputusan-keputusan yang terkait dengan mobilisasi pendanaan iklim.

“
SCF shall assist the COP in exercising its functions with respect to the Financial Mechanism of the Convention in terms of measurement, reporting and verification of support provided to developing countries, inter alia, through preparing biennial assessments (BAs). The BAs are to include information on the geographical and thematic balance of flows drawing from available sources of information, including, inter alia, from biennial reports and biennial update reports. Further guidance is contained in decisions 1/CP.18, paragraph 71, 5/CP.18, paragraph 11, 3/CP.19, paragraph 11, 9/CP.21, paragraph 13, paragraph 37(f) in the annex to decision 8/CP.22, decision 4/CP.24, paragraphs 4, 5 and 10.

Decision 2/CP.17, paragraf 121(f)

Pada COP24, SCF kemudian ditugaskan untuk memberikan pemetaan informasi terkait dengan pencapaian Artikel 2.1c dari Persetujuan Paris, setiap 4 (empat) tahun sekali, sebagai bagian dari *Biennial Assessment*.

“
Requests the Standing Committee on Finance to map, every four years, as part of its biennial assessment and overview of climate finance flows, the available information relevant to Article 2, paragraph 1(c), of the Paris Agreement, including its reference to Article 9 thereof.

Decision 4/CP.24, paragraf 10

“

Underscores the important contribution of the Standing Committee on Finance in relation to the operational definitions of climate finance, and invites Parties to submit via the submission portal, by 30 April 2020, their views on the operational definitions of climate finance for consideration by the Standing Committee on Finance in order to enhance its technical work on this matter in the context of preparing its 2020 Biennial Assessment and Overview of Climate Finance Flows.

Decision 11/CP.25, paragraf 10; dan Decision 5/CMA.2, paragraf 10

”

Pada diskusi terkait dengan penyelesaian BA 2020 dalam pertemuan SCF ke-26, walaupun para anggota telah sepakat dengan hasil laporan teknis (*technical report*) serta rangkumannya, namun para anggota SCF tidak menyepakati rekomendasi yang ada di BA 2020.

Isi dari BA 2020, berdasarkan pertemuan SCF⁶ ke-26, memiliki susunan sebagai berikut:

1. *Acknowledgement* / Sambutan

2. *Introduction* / Pengantar

Bagian ini berisi latar belakang dan tujuan, ruang lingkup, serta pendekatan yang digunakan dalam penyusunan BA 2020.

3. *Chapter I Methodological issues related to transparency of climate* / Bab I Metodologi yang terkait dengan transparansi pendanaan iklim

Berisi gambaran singkat terkait dengan informasi terbaru dari pekerjaan teknis yang sedang berlangsung terkait dengan transparansi pendanaan iklim, termasuk definisi operasional dari pendanaan iklim itu sendiri.

⁶ UNFCCC, *26th Standing Committee on Finance Meeting*, <https://www.youtube.com/watch?v=IR2K8gXw5IU&feature=youtu.be>

Terkait dengan definisi operasional dari pendanaan iklim, terdapat dua hal yang dimuat:

- a. Kompilasi definisi pendanaan iklim dan kriteria yang digunakan oleh berbagai lembaga dan kompilasi informasi tentang bagaimana Para Pihak mendefinisikan mitigasi dan adaptasi dalam dokumen-dokumen yang dihasilkan. Dokumen-dokumen yang dimaksud termasuk *National Communications*, *Biennial Reports*, *Biennial Update Reports*, *Nationally Determined Contributions*, *National Adaptation Plans* dan *Nationally Appropriate Mitigation Actions*;
- b. Perbandingan pendekatan yang digunakan dalam pelaporan pendanaan iklim, termasuk metodologi berbasis sektor untuk memperkirakan pendanaan dari swasta yang dimobilisasi dan pelacakan pendanaan iklim domestik oleh sistem.

Selain itu, terdapat juga pembahasan terkait dengan metodologi-metodologi yang relevan untuk melacak konsistensi pendanaan tersebut dengan tujuan jangka panjang sebagaimana tercantum pada Artikel 2.1 Persetujuan Paris. Pada bagian ini, terdapat pula pembahasan mengenai rekomendasi BA tahun 2014, 2016, dan 2018.

4. *Chapter II Overview of current climate finance flows in 2017-2018* / Bab II Tinjauan aliran pendanaan iklim pada tahun 2017-2018

Bagian ini berisi pemetaan ketersediaan data dan juga gap yang ada di sektor, wilayah, distribusi tematik dan instrumen pendanaan / kelas aset. Bab ini juga menunjukkan diagram yang diperbarui termasuk kecenderungan aliran, distribusi tematik serta geografis, instrumen pendanaan yang digunakan semenjak BA 2014. Bagian ini juga mempertimbangkan pembelajaran dari BA 2018 (klasifikasi sektor dari negara), yang mencakup:

- a. Perkiraan total aliran pendanaan iklim global termasuk aliran internasional dan domestik;
- b. Aliran pendanaan iklim dari negara maju ke negara berkembang;

- c. Pendanaan UNFCCC;
- d. Kerjasama Selatan-Selatan di bidang pendanaan iklim;
- e. Informasi terkait instrumen pendanaan yang digunakan.

Bab ini juga memberikan evaluasi dari kualitas data yang ada, termasuk identifikasi mengenai ketidakpastian dari masing-masing sumber data, serta memberikan gambaran tentang bagaimana menilai kualitas pengukuran serta pelaporan, serta kelengkapan data. Selain itu terdapat juga informasi terbaru dari kumpulan data yang tersedia, dimana data-data tersebut telah mengintegrasikan isu-isu perubahan iklim ke dalam proses pengambilan keputusan untuk asuransi, pinjaman dan investasi. Informasi-informasi ini juga memuat informasi yang relevan untuk sehingga dapat terlihat konsistensinya dengan tujuan jangka panjang yang terdapat pada Pasal 2 ayat 1 Persetujuan Paris.

5. *Chapter III Assessment of climate finance flows* / Bab III Penilaian Aliran Pendanaan Iklim

Bagian ini berisi tujuan tematik dan distribusi geografis aliran pendanaan iklim ke negara berkembang, serta additionality dari pendanaan iklim yang disediakan. Bagian ini juga memberikan informasi terkait dengan efektivitas dari kepemilikan pendanaan iklim, kebutuhan dan dampak dari pendanaan iklim tersebut. Informasi-informasi itu terbagi ke dalam aspek-aspek berikut ini:

- a. Akses ke pendanaan iklim, seperti tantangan, pembelajaran dan peningkatan sejak BA 2018;
- b. Dana-dana yang dijanjikan (*pledges*), dana-dana yang disetujui (*approvals*), dana-dana yang dikomitmenkan serta pencairan pendanaan iklim;
- c. Kepemilikan (*Ownership*);
- d. Penyelarasan pendanaan iklim dengan kebutuhan dan rencana investasi, termasuk dalam konteks *Nationally Determined Contributions* dan *National Adaptation Plans*;

- e. Hasil dan dampak pendanaan iklim yang dilaporkan, dengan memilih beberapa wawasan dan pengalaman yang telah ada;
- f. *Leverage* dan mobilisasi pendanaan iklim;
- g. Biaya teknologi.

Total pendanaan iklim global dan aliran ke negara berkembang dalam konteks:

- a. Total investasi menurut sektor dan wilayah, termasuk *high-carbon energy*;
- b. Perkiraan subsidi;
- c. Subsidi dan langkah-langkah pembiayaan yang mempengaruhi hutan dan alih fungsi;
- d. Pendanaan global yang beresiko akibat perubahan iklim.

Bagian ini juga membicarakan pendanaan iklim terkait dengan isu-isu khusus, seperti gender, pendanaan untuk hutan, instrumen pendanaan untuk mengatasi kerusakan, investasi teknologi dan infrastruktur yang tangguh terhadap dampak perubahan iklim.

6. *Chapter IV Mapping information relevant to Article 2, paragraph 1 (c) of the Paris Agreement, including its reference to Article 9 thereof* / Bab IV Pemetaan informasi yang relevan dengan Artikel 2.1c dari Persetujuan Paris, termasuk rujukannya pada Artikel 9 dari Persetujuan Paris.

Akan tetapi, berdasarkan diskusi di antara member SCF maka diputuskan untuk tidak memasukkan bagian ini, ke dalam BA 2020.

B.2.2. Needs of Developing Countries Report

Pada COP24 yang lalu, COP meminta SCF untuk menyusun sebuah laporan terkait dengan kebutuhan negara-negara berkembang di dalam implementasi Konvensi dan juga Persetujuan Paris. Laporan ini diharapkan dapat disusun setiap 4 (empat) tahun sekali, dan laporan yang pertama diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi COP26 dan juga CMA3.

“

Requests the Standing Committee on Finance to prepare, every four years, a report on the determination of the needs of developing country Parties related to implementing the Convention and the Paris Agreement, for consideration by the Conference of Parties, starting at its twenty-sixth session (November 2020), and the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement, starting at its third session (November 2020).

Decision 4/CP.24, paragraf 13

”

“

Encourages the Standing Committee on Finance to present, to the extent possible, disaggregated information in relation to, inter alia, mapping data availability and gaps by sector, assessing climate finance flows and presenting information on the determination of the needs of developing country Parties related to implementing the Convention and the Paris Agreement.

Decision 11/CP.25, paragraf 9; dan Decision 5/CMA.2, paragraf 9

”

Pada pertemuan SCF yang ke-26, laporan terkait dengan *Needs of Developing Countries* dan juga ringkasan eksekutifnya, telah disepakati oleh para anggota SCF. Ringkasan eksekutif dari laporan ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

- I. *Introduction* / Pengantar
- II. *Context and mandates* / Konteks dan mandat
- III. *Determination of needs* / Menentukan kebutuhan negara-negara berkembang
- IV. *Key Findings* / Temuan Utama

Bagian ini memberikan informasi terkait dengan hal-hal berikut ini:

1. Gambaran kebutuhan negara-negara berkembang yang mencakup:
 - A. Informasi dan data yang diperoleh dari laporan-laporan nasional;
 - B. Informasi dan data yang diperoleh dari laporan aktor regional dan global;

Selain itu, kebutuhan-kebutuhan negara berkembang di bagian ini juga terbagi berdasarkan tematik, distribusi regional (dinyatakan di dalam NDC dari masing-masing regional), serta kebutuhan berdasarkan sektor;
2. Proses dan pendekatan untuk menentukan kebutuhan negara-negara berkembang. Termasuk di dalamnya pengaturan kelembagaan nasional, proses identifikasi kebutuhan, proses dan pendekatan yang digunakan oleh aktor lain, misalnya pendanaan iklim melalui multilateral, bank-bank pembangunan serta badan-badan PBB;
3. Metodologi dan asumsi dasar yang digunakan dalam menentukan kebutuhan negara-negara berkembang:
 - A. Metodologi yang digunakan di tingkat nasional oleh negara berkembang dalam laporan-laporan nasional mereka;
 - B. Metodologi yang digunakan di tingkat regional dan global;
4. Tantangan, peluang dan kesenjangan dalam menentukan kebutuhan negara-negara berkembang:
 - A. Peluang;
 - B. Tantangan: inkonsistensi data, kesenjangan data, interpretasi data;
 - C. Kesenjangan (*gaps*);
 - D. Wawasan dalam menentukan kebutuhan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia: pengalaman dan studi kasus negara;

- E. Manfaat tambahan terkait dengan pemenuhan kebutuhan negara-negara berkembang, seperti Sustainable Development Goals, pengurangan risiko bencana, dan Agenda Aksi Addis Ababa (*Addis Ababa Action Agenda*).

V. *Draft recommendation* / Usulan rekomendasi

Pada bagian ini, SCF menyusun beberapa usulan rekomendasi, sebagai masukan bagi COP dalam mengambil keputusan terkait dengan laporan *Needs of Developing Countries* ini. Usulan rekomendasi tersebut adalah:

- A. Mendorong negara-negara berkembang dan penyedia pendanaan iklim, serta lembaga pendanaan dan multilateral, penyedia data pendanaan swasta dan lembaga terkait lainnya, untuk meningkatkan ketersediaan data granular di tingkat negara terkait dengan implementasi Konvensi dan Persetujuan Paris. Hal ini dimaksudkan untuk mengatasi kesenjangan data yang saat ini ada;
- B. Mendorong negara-negara berkembang untuk berbagi praktik terbaik dalam menentukan kebutuhan, termasuk kapasitas kelembagaan yang kondusif dalam menentukan kebutuhan;
- C. Mendorong Pihak negara berkembang untuk memberikan, jika memungkinkan, informasi terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan: aksi iklim yang responsif gender dan kebutuhan masyarakat adat serta kelompok rentan; penyusunan laporan-laporan nasional untuk UNFCCC termasuk pelaporan kegiatan yang terkandung di dalamnya; menangani dan mengurangi risiko termasuk risiko fisik serta tradisional; kemiskinan energi yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan; metodologi yang digunakan dalam penentuan kebutuhan dalam laporan-laporan nasional untuk disampaikan kepada UNFCCC sesuai dengan pedoman pelaporan jika tersedia, data kuantitatif tentang kebutuhan;
- D. Meminta SCF saat menyiapkan NDR berikutnya, untuk menyajikan data dan informasi yang tersedia tentang kebutuhan terkait dengan rekomendasi ini;

- E. Mengundang *operating entities* dari Mekanisme Pendanaan, badan-badan PBB, lembaga pendanaan multilateral dan bilateral serta lembaga terkait lainnya untuk memberikan informasi seperti yang ada dalam NDR pertama, saat mendukung negara-negara berkembang dalam mengidentifikasi dan menentukan biaya kebutuhan;
- F. Mengundang *operating entities* dari mekanisme pendanaan untuk merevisi *template* dan panduan bagi negara berkembang ketika mendukung proses yang berlangsung di negara berkembang dalam melakukan identifikasi kebutuhan. Hal ini perlu untuk dilakukan, guna meningkatkan ketersediaan informasi terperinci tentang kebutuhan kualitatif dan kuantitatif;
- G. Mendorong *operating entities* dari mekanisme pendanaan, badan-badan PBB, lembaga pendanaan multilateral dan bilateral serta lembaga terkait lainnya, untuk menyediakan informasi lebih lanjut tentang terkait metodologi penentuan dan penetapan biaya kebutuhan, terutama untuk kebutuhan adaptasi dan biaya tambahan yang diperlukan;
- H. Mendorong negara-negara berkembang untuk mempertimbangkan wawasan tentang metodologi yang telah teridentifikasi dalam NDR pertama ketika menghitung biaya serta penentuan kebutuhan;
- I. Mendorong negara-negara berkembang untuk mengambil manfaat dari sumber daya yang tersedia melalui *operating entities* dari mekanisme pendanaan serta aktor multilateral dan bilateral guna memperkuat kapasitas kelembagaan. Kapasitas kelembagaan yang dimaksud adalah kapasitas untuk mengidentifikasi dan membiayai kebutuhan mereka dalam kaitannya dengan pelaksanaan Konvensi dan Persetujuan Paris;
- J. Meminta SCF untuk melibatkan lembaga-lembaga pendanaan publik dan swasta, serta menyebarluaskan temuan dari NDR yang pertama;

- K. Mengundang badan-badan UNFCCC, khususnya *The Paris Committee on Capacity Building (PCCB)* dan *Adaptation Committee (AC)*, untuk mempertimbangkan pandangan yang teridentifikasi dalam NDR pertama ketika mengimplementasikan rencana kerja masing-masing;
- L. Mendorong Para Pihak, lembaga multilateral dan pendanaan, akademisi dan pengembang metodologi lainnya, lembaga penelitian dan aktor terkait lainnya untuk terus mengembangkan metodologi guna menentukan kebutuhan peningkatan adaptasi dan ketahanan serta kebutuhan yang terkait dengan pencegahan, meminimalisir dan mengatasi *loss and damage*;
- M. Mendorong operating entities dari mekanisme pendanaan, badan-badan PBB, lembaga pendanaan multilateral dan bilateral serta lembaga terkait lainnya untuk memberikan dukungan pendanaan dan dukungan teknis kepada negara-negara berkembang dalam memperbarui pelaporan informasi kualitatif dan kuantitatif serta data yang perlu dipertimbangkan dalam NDR berikutnya;
- N. Mendorong semua aktor, saat menentukan kebutuhan untuk implementasi Konvensi dan Persetujuan Paris, juga dapat melihat keterkaitannya dengan implementasi Agenda 2030 dan penerapan Agenda Aksi Addis Ababa.

B.3. Review Ketujuh dari Mekanisme Pendanaan Konvensi (*Seventh Review of the Financial Mechanism*)

Mekanisme pendanaan iklim di bawah Konvensi, sesuai dengan *Decision 9/CP.1* akan direview setiap empat tahun sekali dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan hasil review untuk memperbaiki kinerja dari mekanisme pendanaan iklim tersebut.

Pedoman review yang pertama disampaikan melalui *Decision 3/CP.4*, dengan melihat mekanisme pendanaan iklim dari sudut pandang sebagai berikut:

1. Kesesuaian mekanisme pendanaan iklim sebagaimana yang tercantum di Artikel 11 dari Konvensi;
2. Kesesuaian mekanisme pendanaan iklim dengan arahan yang diberikan oleh COP;
3. Efektivitas dari kegiatan-kegiatan iklim yang didanai, terhadap implementasi Konvensi;
4. Efektivitas dalam penyediaan sumber pendanaan baik berupa hibah atau concessional, termasuk pendanaan untuk transfer teknologi, dalam rangka implementasi tujuan Konvensi berdasarkan arahan yang diberikan oleh COP;
5. Efektivitas mekanisme pendanaan iklim, dalam menyediakan sumber pendanaan kepada negara-negara berkembang sesuai dengan Artikel 4.3 dari Konvensi.

Decision COP23, terkait dengan *Sixth Review of Financial Mechanism*, menyatakan bahwa review mekanisme pendanaan yang ketujuh direncanakan dimulai pada COP26 (November 2020) dan selesai pada COP27 (November 2021). Paragraf 4 dari keputusan itu menyatakan agar review mekanisme pendanaan yang ketujuh dapat mengacu pada panduan seperti tercantum di dalam lampiran dari *Decision 12/CP.22*. Panduan ini yang digunakan untuk melakukan review keenam dari mekanisme pendanaan. Kutipan dari lampiran *Decision 12/CP.22* berada di Lampiran A dari panduan ini.

B.4. New Collective Quantified Goal

Melalui *Decision 1/CP.21* paragraf 53, negara-negara yang meratifikasi Konvensi Perubahan Iklim bersepakat bahwa dalam rangka untuk melanjutkan komitmen negara-negara maju dalam memobilisasi pendanaan, maka negara-

negara maju akan melanjutkan upaya mereka untuk memobilisasi pendanaan hingga USD 100 miliar di tahun 2025. Sebelum mencapai tahun 2025, akan dimulai proses untuk menentukan target mobilisasi pendanaan yang baru, yang merupakan target selanjutnya setelah tahun 2025. Besaran USD 100 miliar, akan menjadi pendanaan minimum untuk dimobilisasi.

“

*Also decides that, in accordance with Article 9, paragraph 3, of the Agreement, developed countries intend to continue their existing collective mobilization goal through 2025 in the context of meaningful mitigation actions and transparency in implementation; prior to 2025 the **Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement** shall set a new collective quantified goal from a floor of USD 100 billion per year, taking into account the needs and priorities of developing countries;*

Decision 1/CP.21, paragraf 53

”

“

As part of a global effort, developed country Parties should continue to take the lead in mobilizing climate finance from a wide variety of sources, instruments and channels, noting the significant role of public funds, through a variety of actions, including supporting country-driven strategies, and taking into account the needs and priorities of developing country Parties. Such mobilization of climate finance should represent a progression beyond previous efforts.

Artikel 9.3, Persetujuan Paris

”

Pada COP24 di Katowice, melalui *Decision 14/CMA.1* paragraf 1, negara-negara Pihak menyetujui untuk memulai proses negosiasi untuk target pendanaan yang baru, di COP26 yang pada waktu itu direncanakan untuk dilakukan pada bulan November 2020. Itu sebabnya, agenda ini muncul

kembali di COP26 Glasgow, untuk membuka agenda negosiasi tersebut, guna membahas jumlah pendanaan yang akan dimobilisasi setelah tahun 2025, di mana USD 100 miliar sudah bukan lagi menjadi target, tetapi menjadi nilai minimum yang harus dimobilisasi.

“

Decides to initiate at its third session (November 2020), in accordance with Article 9, paragraph 3, of the Paris Agreement, deliberations on setting a new collective quantified goal from a floor of USD 100 billion per year in the context of meaningful mitigation actions and transparency of implementation and taking into account the needs and priorities of developing countries.

Decision 14/CMA.1, paragraf 1

”

B.5. Article 9.5 of the Paris Agreement (Ex-Ante Information)

CMA, melalui *Decision 12/CMA.1*, mengakui pentingnya informasi terkait dengan kejelasan dan prediksi dukungan pendanaan yang diberikan negara-negara maju kepada negara-negara berkembang. Melalui keputusan yang sama, CMA memutuskan untuk menerapkan beberapa hal yang dibangun dari apa yang telah dilakukan di *long-term finance*. Hal-hal tersebut mencakup:

- *Biennial communications*;
- Portal online tersendiri;
- Kompilasi dan sintesis dari *Biennial Communication*;
- Lokakarya *in-session* setiap dua tahun sekali;
- Dialog tingkat menteri yang dilangsungkan setiap dua tahun sekali.

Decision 12/CMA.1 juga menyatakan bahwa pada tahun 2023, akan diadakan review terkait dengan informasi apa saja yang akan diberikan oleh negara-

negara maju mengenai kejelasan dan prediksi dukungan pendanaan yang akan disediakan oleh negara-negara maju untuk negara-negara berkembang. Informasi-informasi yang diberikan oleh negara-negara maju untuk *biennial communications* pertama ini merujuk pada *Annex* dari *Decision 12/CMA.1*.

Agenda Artikel 9.5 yang akan dibahas di Glasgow sebagai bagian dari CMA 3, akan membahas hasil lokakarya terkait dengan kompilasi dan sintesis dari *Biennial Communication* yang diselenggarakan oleh Sekretariat pada tanggal 11 Juni 2021 yang lalu secara virtual.

B.5.1. Rangkuman Laporan Sintesis Submisi Dua Tahunan Informasi *Ex-Ante*

Dokumen kompilasi submisi *Biennial Communication* bersama dengan sintesis dari kompilasi tersebut merupakan sebuah dokumen rujukan dengan nomor FCCC/PA/CMA/2021/3. Dokumen ini disusun oleh Sekretariat UNFCCC atas permintaan CMA melalui *Decision 12/CMA.1*. Kompilasi submisi yang diajukan oleh negara-negara maju terkait dengan informasi *ex-ante* berdasarkan *Decision 12/CMA.1* diharapkan untuk dibahas pada CMA 4 di tahun 2021. Untuk mengembalikan jalur negosiasi ke kerangka waktu semula, pembahasan kompilasi dan sintesis submisi terkait dengan Artikel 9.5 Persetujuan Paris akan dibahas pada COP26 mendatang. Pada kompilasi ini, terdapat 9 submisi yang diajukan dan berasal dari Norwegia, Jepang, Kanada, Monako, Australia, Selandia Baru, Inggris, Swiss, dan Uni Eropa.

Laporan kompilasi tersebut terdiri dari 3 bagian laporan utama serta 6 lampiran (*Annex*). Laporan utama terdiri dari *Introduction*, *Overview*, dan *Synthesis*. Bagian *Introduction* memberikan latar belakang mandat disusunnya laporan tersebut, serta tujuannya. Bagian *Overview* memberikan gambaran hal-hal apa saja yang muncul di dalam submisi *Biennial Communication* yang telah terkumpul di pertengahan tahun 2021. Bagian *Synthesis* memberikan gambaran isu-isu yang beririsan sebagaimana diajukan oleh negara-negara maju. Bagian lampiran, memberikan gambaran secara rinci terkait bagaimana

pendanaan iklim yang berasal dari sumber publik akan disediakan untuk negara berkembang. Hal ini tercantum di dalam *Biennial Communication* tersebut dan berada di dalam *Annex I*. *Annex II* sendiri memberikan gambaran pendanaan iklim yang telah disediakan bagi negara-negara berkembang, sebagaimana yang dilaporkan di dalam *Biennial Communication*. *Annex III* memberikan gambaran mengenai kriteria-kriteria yang digunakan oleh penyedia pendanaan iklim, dalam mengevaluasi proposal-proposal kegiatan yang tertera di dalam *Biennial Communication*. *Annex IV* dari dokumen ini memuat institusi-institusi publik yang dilaporkan dalam *Biennial Communication* yang berfungsi sebagai katalis bagi pendanaan iklim dari sumber swasta serta contoh-contoh kegiatan yang dilakukan. *Annex V* memberikan contoh program dan inisiatif yang dilakukan untuk mendukung negara-negara berkembang di dalam memobilisasi pendanaan iklim dari sumber swasta, dan dilaporkan di dalam *Biennial Communication*. Sedangkan *Annex VI* dalam dokumen ini berisi program-program dan inisiatif-inisiatif yang dilaporkan di dalam *Biennial Communication* untuk menjadikan aliran pendanaan konsisten dengan arah-arrah pembangunan yang rendah karbon serta tangguh terhadap dampak perubahan iklim.

Laporan ini membahas 15 isu yang bersinggungan di antara submisi-submisi yang diajukan terkait dengan *Biennial Communication*. Ke-15 isu itu adalah:

- A. Proyeksi besaran pendanaan iklim dari sumber publik;
- B. Program, saluran pendanaan, dan instrumen;
- C. Kebijakan dan prioritas;
- D. Tujuan dan tipe dukungan pendanaan iklim;
- E. Kriteria untuk mengevaluasi proposal kegiatan;
- F. Pendanaan iklim tambahan dan baru (*new and additional*);
- G. Situasi nasional dan keterbatasan yang relevan dalam menyediakan informasi *ex-ante* terkait pendanaan iklim;
- H. Metodologi dan asumsi yang digunakan dalam menentukan proyeksi besaran pendanaan iklim;

- I. Tantangan, hambatan dan pembelajaran;
- J. Memastikan keseimbangan antara pendanaan untuk adaptasi dan mitigasi;
- K. Mobilisasi pendanaan iklim tambahan dari berbagai sumber;
- L. Menangani kebutuhan dan prioritas negara-negara berkembang;
- M. Dukungan bagi negara berkembang dalam mencapai tujuan-tujuan Persetujuan Paris, termasuk upaya-upaya untuk membuat aliran pendanaan konsisten dengan pembangunan rendah emisi dan tangguh pada dampak perubahan iklim;
- N. Mengintegrasikan isu perubahan iklim, termasuk ketangguhan perubahan iklim ke dalam dukungan pembangunan;
- O. Bagaimana dukungan yang diberikan dapat meningkatkan kapasitas negara-negara berkembang.

Rangkuman ini hanya akan membahas beberapa aspek dari bagian sintesis laporan tersebut, yaitu: (i) proyeksi besaran pendanaan iklim dari sumber publik; (ii) program, saluran pendanaan, dan instrumen; (iii) pendanaan iklim tambahan dan baru; (iv) memastikan keseimbangan antara pendanaan untuk adaptasi dan mitigasi; dan (v) menangani kebutuhan dan prioritas negara-negara berkembang.

Proyeksi Besaran Pendanaan Iklim dari Sumber Publik

Pada sintesis *Biennial Communication* terkait informasi *ex-ante*, terdapat 3 cara yang digunakan oleh negara-negara maju, untuk mengkomunikasikan pendanaan iklim yang berasal dari sektor publik kepada negara berkembang:

- (i) Dengan menunjukkan komitmen pendanaan iklim multi-tahun pada periode paska 2020. Misalnya, Inggris menyatakan akan meningkatkan komitmen pendanaannya sebesar GBP 11,6 miliar di tahun 2021/2022-2025/2026 dari yang sebelumnya dicairkan yaitu GBP 5,8 miliar pada tahun 2016/2017-2020/2021. Sedangkan Australia menyatakan bahwa mereka akan menyediakan pendanaan sebesar AUD 1,5 miliar

untuk periode tahun 2020-2025, meningkat sebesar AUD 500 juta dibandingkan dengan yang telah disediakan pada tahun 2015-2020, yaitu sebesar AUD 1 miliar;

- (ii) Pendanaan iklim yang disediakan dalam jangka waktu satu atau dua tahun ke depan. Misalnya, Norwegia menyatakan, mereka akan menyediakan NOK 3,1 miliar ke dalam anggaran 2021 dari badan kerjasama bilateral mereka. Jerman akan menyediakan sebesar EUR 437 juta di tahun 2022 melalui *International Climate Initiative*, sedangkan di tahun 2021 Jerman akan menyalurkan EUR 487 juta.
- (iii) Kontribusi multi-tahun melalui program-program dan inisiatif-inisiatif bilateral dan multilateral yang akan dilakukan sampai melewati tahun 2020. Contohnya adalah kontribusi pada *GCF replenishment* pertama (*GCF-1*) dan *replenishment* ketujuh dari GEF (*GEF-7*).

Program, Saluran pendanaan, dan Instrumen

Submisi yang diajukan oleh negara-negara maju terkait dengan pendanaan iklim yang akan dimobilisasi, memberikan gambaran mengenai program, saluran, dan instrumen pendanaan yang akan digunakan. Terkait dengan program, banyak submisi yang menyatakan bahwa pendanaan iklim yang akan diberikan akan mendanai program-program dan inisiatif-inisiatif untuk mendampingi negara-negara berkembang di dalam memformulasikan dan mengimplementasikan rencana-rencana perubahan iklim yang telah disusun. Negara-negara maju juga menyatakan bahwa saluran pendanaan yang akan mereka pergunakan adalah melalui bilateral dan juga multilateral. Multilateral disini dapat mencakup pendanaan-pendanaan iklim di bawah UNFCCC, badan-badan PBB, serta bank-bank pembangunan. Instrumen yang digunakan adalah pendanaan publik yang berbasis hibah, serta adanya *green bond* dan juga *blended finance*.

Pendanaan Iklim Tambahan dan Baru (*New and Additional*)

New and additional merupakan terminologi yang selalu digunakan dalam hal pendanaan iklim. Terminologi ini menyatakan bahwa pendanaan iklim

haruslah pendanaan yang baru, dan tidak menjadi bagian dari pendanaan-pendanaan pembangunan yang biasanya disalurkan oleh negara-negara maju kepada negara berkembang. Jumlah dari dana tersebut juga harus melebihi dari dana-dana pembangunan yang disebutkan sebelumnya.

Terkait dengan *new and additional*, beberapa negara menyebutkan bahwa besaran dari pendanaan iklim yang dikomunikasikan merupakan dana yang bersifat *new and additional*, karena besarnya di atas 0,7% GNI (*Gross National Income*) dari negara yang bersangkutan. Artinya, negara tersebut akan memberikan pendanaan iklim, tanpa mengganggu jumlah ODA (*Official Development Assistance*) sebesar 0,7% GNI dari negara kontributor yang diperuntukkan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat dari negara penerimanya. Belgia dan Luxemburg menyatakan bahwa pendanaan iklim yang mereka sediakan adalah *new and additional* karena melebihi komitmen ODA yang mereka berikan. Swedia menyatakan bahwa penyediaan 1% dari GNI mereka sebagai ODA (di mana pendanaan iklim merupakan bagian daripadanya), dapat disebut sebagai *new and additional*, karena melebihi komitmen yang dibuat oleh negara maju untuk menyediakan kesetaraan dengan 0,7% dari GNI mereka sebagai dampingan pembangunan.

Banyak negara maju yang menyatakan bahwa dana-dana yang disetujui oleh Parlemen untuk dikucurkan adalah dana-dana yang bersifat *new and additional*.

Kanada dan Finlandia menyatakan bahwa *new and additional* berarti adalah dana-dana yang baru dikomitmenkan, dialokasikan atau disalurkan untuk proyek-proyek dan program-program perubahan iklim baru di dalam satu rentang waktu tertentu. Kanada dan Finlandia menggunakan tahun dasar 2009 dalam perhitungannya.

Keseimbangan antara Pendanaan Adaptasi dan Mitigasi

Seluruh negara maju yang mengajukan submisi *Biennial Communication* pendanaan iklim yang akan dimobilisasi oleh negara maju, memberikan

penekanan pentingnya keseimbangan antara pendanaan adaptasi dan mitigasi. Beberapa negara mengungkapkan kebijakan mereka yang bertujuan untuk meningkatkan dukungan bagi adaptasi, termasuk target-target dan kerangka waktu dari dukungan tersebut. Misalnya Perancis bermaksud untuk meningkatkan pendanaan adaptasinya hingga EUR 1,5 miliar per tahun sampai dengan tahun 2020, dengan memprioritaskan negara-negara Afrika, LDCs dan terutama negara-negara berkembang yang rentan pada dampak perubahan iklim, serta berfokus pada sektor pertanian.

Beberapa negara mencatat bahwa pendanaan proyek dan program adaptasi ditentukan berdasarkan permintaan. Bagi Finlandia contohnya, mencapai keseimbangan antara dukungan adaptasi dan mitigasi akan bergantung pada kinerja dari institusi multilateral yang terlibat, serta proposal-proposal kegiatan yang dibangun berdasarkan kebutuhan negara-negara berkembang.

Beberapa negara menyebutkan GCF sebagai saluran pendanaan utama untuk dukungan adaptasi, terutama dengan mandat yang diberikan pada GCF, untuk memastikan tercapainya alokasi 50/50 untuk pendanaan antara mitigasi dan adaptasi. Beberapa negara maju juga menyatakan rencana-rencana dan aksi-aksi untuk meningkatkan pendanaan iklim dari sumber swasta untuk adaptasi, dan bukan hanya pendanaan-pendanaan dari sumber publik saja.

Menangani Kebutuhan dari Prioritas Negara-Negara Berkembang

Banyak submisi yang menitikberatkan pentingnya *country ownership* (kepemilikan) dari aksi-aksi perubahan iklim. *Country ownership* sendiri memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan keberlanjutan. Selain itu, banyak juga negara maju yang menyatakan pentingnya membantu negara berkembang terutama dalam hal peningkatan kapasitas untuk mengintegrasikan perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan nasional dan juga dalam mengelola proyek-proyek perubahan iklim yang masih dalam proses pengembangan.

Pentingnya konsultasi dengan negara-negara penerima pendanaan iklim memungkinkan negara-negara kontributor untuk mengerti konteks dan kebutuhan negara-negara penerima, serta memastikan dukungan tersebut dapat disesuaikan dengan perubahan keadaan yang mungkin terjadi di kemudian hari.

B.5.2. Lokakarya Artikel 9.5

Lokakarya Artikel 9.5 pada tanggal 11 Juni 2021 yang lalu merupakan *biennial in-session workshop* yang pertama sebagaimana dimandatkan oleh *Decision 12/CMA.1*. Lokakarya ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Berbagi pandangan terkait dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen *First Biennial Communications dan Compilation and Synthesis*;
2. Mendiskusikan potensi perbaikan dari keseluruhan kondisi terkait dengan informasi yang tersedia mengenai prediksi dan kejelasan pendanaan iklim, berdasarkan pembelajaran yang didapat dari *First Biennial Communications*.

Pertemuan dibuka oleh *Executive Secretary UNFCCC* dan juga perwakilan Presidensi COP25. *Co-Facilitator* dalam pertemuan ini adalah Andres Morgo (Ekuador) dan Gabriela Blatter (Swiss). Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan presentasi oleh perwakilan dari *developed country* dan perwakilan dari *developing country*.

Presentasi *developed country* oleh Gertaurd Wollansky dari Austria atas nama Uni Eropa, yang berisi hal-hal sebagai berikut:

- Hampir semua negara anggota EU melaporkan informasi sesuai dengan *Annex Decision 12/CMA.1*;
- EU melihat bahwa *predictability of finance* merupakan hal yang diminta oleh negara-negara mitra. Selain itu, EU menyadari kebutuhan untuk meningkatkan lingkup, skala dan kecepatan dari mobilisasi pendanaan iklim;

- EU juga melihat bahwa pendanaan untuk adaptasi sangat penting terlebih untuk negara-negara yang rentan. EU akan terus berusaha untuk menjaga keseimbangan antara adaptasi dan mitigasi;
- Hal yang dapat dipelajari dalam penyusunan *Biennial Communications* di antaranya adalah meningkatkan proses koordinasi nasional serta peningkatan kapasitas internal sehingga dapat menghasilkan informasi yang lebih baik dan meningkatkan koordinasi aktor di level nasional dan internasional untuk meningkatkan efektivitas.

Pandangan dari negara berkembang disampaikan oleh Abhisek Acharya dari India, yang merupakan pandangan dari perwakilan negara berkembang dalam melihat dokumen *Biennial Communications* yang telah disampaikan negara maju. Adapun hal-hal yang disampaikan adalah:

- Beberapa dokumen *Biennial Communications* telah menghubungkan aliran pendanaan dengan *low greenhouse gas pathways*. Paparan tersebut juga menggarisbawahi pentingnya peran Menteri Keuangan, Bank *Central*, dan regulator keuangan, pendanaan adaptasi berbasis hibah untuk LDCs dan SIDS, dan menunjukkan *scale up* pendanaan swasta untuk adaptasi;
- Hal yang negara berkembang harapkan dalam *Biennial Communications* adalah lebih banyak prediktabilitas dan kejelasan dari dukungan pendanaan untuk implementasi Persetujuan Paris;
- Terkait dengan *clarity in projections* diharapkan adanya peningkatan kejelasan terkait dengan tingkat pendanaan yang diproyeksikan (*clarity on projected levels*) dari pendanaan publik yang disediakan untuk negara berkembang. Disampaikan juga perlunya skala indikator dari kontribusi dukungan yang diberikan negara maju khususnya dalam komitmen USD 100 miliar serta dibandingkan dengan kontribusi pra-2020. Beberapa submisi menghitung ODA sebagai pendanaan iklim, padahal ODA baru dapat dikategorikan sebagai pendanaan iklim jika ada komponen *new and additional* yang khusus untuk isu perubahan iklim;

- Terkait dengan sumber yang *new and additional*, ditemukan bahwa dalam beberapa *Biennial Communications* disampaikan adanya indikator pendanaan yang termasuk sebagai *new and additional*, namun dalam beberapa submisi lainnya lebih banyak membahas mengenai iklim dengan dampingan pembangunan, dibandingkan menjelaskan pendanaan apa yang dapat disebut *new and additional*;
- Negara berkembang mengusulkan agar negara maju hanya menghitung pendanaan hibah yang dapat diklaim sebagai pendanaan iklim;
- Pembahasan terkait mobilisasi pendanaan swasta, hampir tidak ada dalam semua submisi yang masuk. Selain itu, beberapa submisi menggarisbawahi dukungan yang diberikan melalui Bank Pembangunan Multilateral dan bilateral namun tidak membahas *concessional element* dari pendanaan mereka;
- Negara berkembang melihat pentingnya memiliki definisi yang jelas akan apa yang disebut sebagai pendanaan iklim atau *climate finance*.

Setelah kedua paparan tersebut, *Co-Facilitator* membuka sesi diskusi dengan adanya memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk memulai diskusi sebagai berikut:

1. Hal-hal apa saja yang dapat ditarik dari informasi yang terdapat di dalam *Biennial Communications*?
2. Apakah *Biennial Communications* ini menjadi lebih baik dari submisi-submisi sebelumnya mengenai strategi dan pendekatan untuk meningkatkan besaran pendanaan iklim? Bagaimana cara memperbaikinya?
3. Apakah ada pembelajaran yang dapat ditarik dari *Biennial Communications* ini, dan hal apa saja yang dapat ditarik sebagai pertimbangan untuk *Biennial Communications* berikutnya?
4. Bagaimana *Biennial Communications* dapat ditingkatkannya prediktabilitas dan kejelasan dari informasi mengenai dukungan finansial untuk implementasi dari Persetujuan Paris?

Terdapat beberapa hal yang diangkat oleh peserta dalam menanggapi pertanyaan tersebut, di antaranya:

- Dari sisi negara berkembang:
 - *Biennial Communications* masih kurang memperlihatkan prediktabilitas, *clarity* serta tidak menampilkan informasi kualitatif dan kuantitatif terkait pendanaan iklim;
 - Perlu ada perbedaan antara *Biennial Communications* dengan laporan yang terkait transparansi di bawah Artikel 13 Persetujuan Paris;
 - Perlu ada informasi tambahan pendanaan yang masuk ke dalam mekanisme pendanaan di bawah UNFCCC;
 - Beberapa submisi memasukkan informasi pendanaan yang mereka berikan untuk GEF. Walau demikian, GEF tidak hanya melayani UNFCCC namun juga UN *agency* lainnya, selain itu dana *climate* di dalam GEF semakin menurun.
- Dari sisi negara maju:
 - *Biennial Communications* ini memiliki peranan yang penting, negara maju juga memiliki tantangan dalam penyusunannya. Terlebih hal-hal yang terkait dengan *level of details information* karena prosedur pendanaan dari masing-masing negara berbeda.
 - Terkait dengan ODA, EU melihat bahwa ODA merupakan perangkat untuk menyalurkan pendanaan iklim bagi negara berkembang.

B.6. Adaptation Fund

Adaptation Fund merupakan salah satu pundi pendanaan yang mendapat arahan dari Para Pihak yang meratifikasi Protokol Kyoto. Pendanaan ini dibentuk di tahun 2001, dengan tujuan untuk mendanai proyek-proyek dan program-program adaptasi yang nyata di negara-negara berkembang yang

meratifikasi Protokol Kyoto; utamanya, negara-negara yang rentan terhadap dampak dari perubahan iklim.

Adaptation Fund merupakan pendanaan multilateral pertama yang memberikan akses langsung (*direct access*) bagi negara-negara berkembang, melalui national implementing entity. Dalam *Adaptation Fund* tidak dikenal adanya intermediaries, karena instrumen pendanaannya mayoritas berbentuk hibah. Pendanaan yang berasal dari *Adaptation Fund* dapat dimanfaatkan oleh negara-negara berkembang melalui *Implementing Entities* (IE) yang telah terakreditasi baik nasional, regional maupun multilateral.

Sumber pendanaan dari pundi *Adaptation Fund* sebagian besar berasal dari *share of proceeds* (SoP) yang dikenakan kepada kegiatan-kegiatan di bawah mekanisme pembangunan bersih (MPB) atau *clean development mechanism* (CDM). Walau demikian, sumber pendanaan *Adaptation Fund* juga dapat berasal dari sumber lainnya, seperti kontribusi dari negara-negara maju, swasta, dan individu⁷. Besaran SoP yang dikenakan adalah 2% dari *Certified Emission Reductions* (CERs) yang dihasilkan dari setiap proyek CDM.

Adaptation Fund sendiri diawasi dan dikelola oleh *Adaptation Fund Board* (AFB), yang terdiri dari 16 anggota, dan 16 *alternates*, dengan frekuensi pertemuan setidaknya dua kali dalam setahun.

Melalui *Decision 1/CMP.8*, Para Pihak yang meratifikasi Protokol Kyoto memutuskan bahwa untuk periode komitmen kedua, pendanaan untuk *Adaptation Fund* akan ditingkatkan melalui pengenaan SoP sebesar 2% dari transfer *Assigned Amount Units* (AAU) internasional pertama dan juga penerbitan *Emission Reduction Units* (ERUs) untuk proyek-proyek terkait dengan Artikel 6 dari Protokol Kyoto, segera setelah konversi AAUs ke ERUs atau *Removal Units* (RMUs) yang sebelumnya dimiliki oleh Para Pihak.

⁷ *Adaptation Fund, About*, diakses pada Oktober 28 2021, <https://www.adaptation-fund.org/about/governance/>

Melalui *Decision 13/CMA.1* dan *Decision 1/CMP.14*, *Adaptation Fund* diputuskan untuk selanjutnya mendapatkan arahan dari Para Pihak yang meratifikasi Persetujuan Paris, melalui CMA, efektif pada tanggal 1 Januari 2019. Melalui keputusan yang sama, Para Pihak juga menyepakati bahwa pada saat SoP dari implementasi Artikel 6.4 Persetujuan Paris telah berjalan, maka *Adaptation Fund* tidak akan lagi mendapatkan arahan dari Para Pihak Protokol Kyoto. Para Pihak juga menyepakati bahwa *Adaptation Fund* akan terus menerima pendanaan dari SoP, jika memungkinkan, yang berasal dari kegiatan-kegiatan di bawah Artikel 6, 12, dan 17 dari Protokol Kyoto.

Negosiasi terkait *Adaptation Fund* di Glasgow akan berada di bawah CMP16, CMA3 dan SBI 52-55, dengan rincian sebagai berikut:

- *CMP16: Report of the Adaptation Fund Board dan Fourth Review of the Adaptation Fund*
- *CMA3: Matters relating to the Adaptation Fund*
- *SBI 52-55: Membership of the Adaptation Fund Board dan Fourth Review of the Adaptation Fund*

B.6.1. Fourth Review of the Adaptation Fund

Melalui *Decision 6/CMP.6* paragraf 1 diputuskan bahwa review *Adaptation Fund* harus dilakukan tiga tahun sekali dan dimulai dari CMP7 di Durban, pada tahun 2011. Kemudian *second review* dilakukan pada CMP10 di Lima, tahun 2014 dan *third review* dilakukan pada CMP13 di Bonn, tahun 2017.

CMP kemudian meminta SBI (yang seharusnya dilaksanakan Juni 2020) untuk mulai menginisiasi *fourth review of the Adaptation Fund*, sesuai dengan *terms of reference* yang terdapat dalam *Annex* dari *Decision 1/CMP.12* dan akan melaporkan kembali kepada *governing body* yang akan diselenggarakan bersamaan dengan COP27 (November 2021). Akan tetapi, dengan adanya penundaan sesi negosiasi pada tahun 2020, *review* tersebut tidak dapat dikerjakan dan dilaporkan. Oleh karena itu, pada tahun 2021 proses *review* ini dimulai diantaranya melalui pertemuan *informal*

consultation yang dilaksanakan oleh *Co-Chair* SBI pada tanggal 14 April 2021 dan juga menjadi salah satu pembahasan di bawah agenda SBI pada sesi Konferensi Perubahan Iklim pada bulan Mei–Juni (*May–June Climate Change Conference*) yang berlangsung secara virtual pada tanggal 31 Mei – 17 Juni 2021 lalu. Pertemuan tersebut mulai membahas dan meminta pandangan dari Para Pihak terkait *Terms of Reference of the fourth review of the Adaptation Fund*, di mana nantinya ToR ini akan dijadikan panduan dalam melakukan review. Selain itu, dalam pertemuan *May–June Climate Change Conference* telah keluar juga dokumen *Co-facilitators informal note related to the fourth review of the Adaptation Fund*⁸. Pembahasan mengenai agenda ini akan dilanjutkan di Glasgow di bawah SBI52-55 dan juga CMP16.

B.6.2. Membership of the Adaptation Fund Board

Decision 13/CMA.1 dan *Decision 1/CMP.14*, memutuskan bahwa Para Pihak negara berkembang dan Para Pihak negara maju yang merupakan Para Pihak dari Persetujuan Paris berhak menjadi anggota *Adaptation Fund Board* (AFB) dan meminta SBI50 (sesi berlangsung pada Juni 2019) untuk mempertimbangkan pembahasan keanggotaan AFB serta memberikan rekomendasi kepada COP25.

Pada pertemuan SBI50 tersebut, terdapat perbedaan pendapat dalam melihat agenda ini. Beberapa negara berkembang melihat tidak perlu ada perubahan atau pembahasan di struktur AFB karena cukup menggunakan susunan anggota AFB yang sudah ada. Sementara negara maju ingin ada perubahan komposisi AFB. Pada akhirnya, tidak ada kesepakatan dari Para Pihak terkait dengan agenda keanggotaan AFB.

Pada pertemuan SBI51 (sesi berlangsung pada Desember 2019), terdapat perbedaan pandangan kembali antara negara berkembang dan negara maju

⁸ Dokumen ini dapat diakses pada tautan berikut ini: <https://unfccc.int/documents/279083>

dalam melihat agenda ini. Negara berkembang melihat bahwa Para Pihak dari Persetujuan Paris telah memenuhi syarat untuk menjadi AFB. Sehingga tidak perlu ada pembahasan apapun terkait agenda ini. Sementara itu, terdapat pula negara maju yang menginginkan untuk meningkatkan representasi negara maju di dalam *Adaptation Fund Board*. Pada akhirnya, tidak ada kesepakatan untuk agenda ini dan sepakat untuk melanjutkan pembahasan ini pada pertemuan SBI52.

Agenda ini tidak dibahas dalam pertemuan *May-June Climate Change Conference* dan juga belum ada *informal meeting* di bawah UNFCCC untuk membahas agenda ini. Agenda ini baru akan dibahas pada pertemuan SBI 52-55 di Glasgow.

B.6.3. Laporan dari Adaptation Fund Board

Seperti telah disampaikan sebelumnya bahwa *Adaptation Fund Board* (AFB) bertindak untuk mengelola dan mengawasi *Adaptation Fund* (AF). AFB terdiri dari 16 anggota, dan 16 *alternates*, dengan frekuensi pertemuan setidaknya dua kali dalam setahun. Berdasarkan *Decision 1/CMP.3* AFB diminta untuk memberikan laporan atas kegiatan yang dilakukan, dan melaporkannya pada setiap sesi CMP. Kemudian melalui *Decision 13/CMA.1* Para Pihak memutuskan AF selanjutnya akan mendapatkan arahan dari negosiasi di bawah Persetujuan Paris, melalui CMA, efektif pada tanggal 1 Januari 2019. Oleh karena itu, laporan AFB memuat kemajuan AF dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh CMP dan juga rekomendasi yang akan diputuskan oleh CMP dan CMA.

Mengingat bahwa CMA belum memberikan panduan khusus kepada AF mengenai hal-hal yang terkait dengan Persetujuan Paris, maka laporan yang dikeluarkan oleh AFB tidak memisahkan informasi yang diberikan kepada CMP maupun CMA.

Laporan AFB pertama kepada CMP dan CMA periode 1 Juli 2019- 30 Juni 2020, mencakup beberapa informasi sebagai berikut:

- Diharapkan CMA dan CMP dapat memberikan panduan atau klarifikasi terkait *eligibility* dari Para Pihak untuk mengakses pendanaan AF. Mengingat adanya satu permintaan pendanaan yang telah diterima Sekretariat AFB di mana Pihak itu tidak termasuk dalam Para Pihak dari Protokol Kyoto, namun sedang berproses meratifikasi Persetujuan Paris;
- AFB dalam periode yang dimaksud, telah meluluskan permohonan akreditasi dari tiga NIE (*National Implementing Entity*) dan satu MIE (*Multilateral Implementing Entity*);
- Kumulatif penerimaan AF *Trust Fund* mencapai USD 978,32 juta terdiri dari USD 204,74 juta dari monetisasi CER, USD 735,25 juta dari kontribusi dan USD 38,33 juta dari pendapatan investasi yang diperoleh *Trust Fund* (per 30 Juni 2020). Penerimaan selama periode pelaporan sebesar USD 91,23 juta terdiri dari USD 3,33 juta dari monetisasi CER, USD 77,32 juta dari tambahan kontribusi dan USD 10,58 juta dari pendapatan investasi;
- Kontribusi USD 77,32 juta berasal dari Jerman, Irlandia, Norwegia, Polandia, Spanyol, Swedia, Swiss, *Brussels-Capital* dan *Flanders Regions of Belgium*;
- Persetujuan proyek dan program kumulatif meningkat sebesar 32% mencapai USD 744,58 juta (per 30 Juni 2020);
- Sebanyak 16 proyek atau program yang diajukan oleh IE (*Implementing Entity*) telah disetujui dengan total dana USD 109,8 juta termasuk 3 proposal yang diajukan oleh NIE untuk Indonesia dan Republik Tanzania (dua proposal) sebesar USD 3 juta;
- Sebanyak 5 proyek regional (*multi-country*) telah disetujui dengan pendanaan sebesar USD 60 juta;
- Terkait dengan komposisi AFB, penundaan COP26 berpotensi berdampak terhadap pemilihan member AFB dan juga pemenuhan kuorum AFB pada tahun 2021. Mengingat adanya prosedur yang menyatakan bahwa dalam keanggotaan AFB tidak memungkinkan anggota dan anggota *alternate* untuk tetap menjabat sampai adanya pengganti yang terpilih;

- Terkait respon terhadap Covid-19, AFB memiliki kelonggaran dalam prosedur persetujuan proyek (*project approval*) terutama dalam menanggapi permintaan perpanjangan penyelesaian proyek. Respon ini memungkinkan bagi Para Pihak untuk menyelesaikan kegiatan proyek karena adanya kelonggaran yang diberikan. Selain itu, untuk mendukung negara berkembang dalam situasi pandemik, sekretariat AFB melakukan survei terhadap semua IE pada Juni 2020. Tinjauan awal menunjukkan bahwa Covid-19 memiliki dampak sedang hingga tinggi pada portofolio proyek dan nantinya di masa mendatang diperkirakan akan muncul masalah implementasi proyek.

Pada laporan AFB kedua kepada CMP dan CMA periode 1 Juli 2020- 30 Juni 2021, selain dari hal-hal yang sudah disampaikan pada laporan pertama, terdapat beberapa hal lain yang ditambahkan dan atau diperbaharui, yaitu:

- Terdapat keputusan signifikan yang telah diambil oleh AFB, untuk meningkatkan cap pendanaan per negara dari USD 10 juta menjadi USD 20 juta. Selain itu, jumlah NIE terakreditasi dari negara berkembang yang memenuhi syarat dinaikkan dari satu menjadi dua;
- AFB mengambil sejumlah keputusan kebijakan untuk lebih meningkatkan persetujuan implementasi proyek, termasuk keputusan untuk merampingkan proyek dan proses peninjauan program;
- Kumulatif penerimaan ke AF *Trust Fund* mencapai USD 1.107,40 juta terdiri dari USD 208,38 juta dari monetisasi CER, USD 858,82 juta dari kontribusi dan USD 40,21 juta dari pendapatan investasi yang diperoleh *Trust Fund* (per 30 Juni 2021). Penerimaan selama periode pelaporan sebesar USD 129,08 juta terdiri dari USD 3,64 juta dari monetisasi CER, USD 123,57 juta dari tambahan kontribusi dan USD 1,87 juta dari pendapatan investasi;
- Kontribusi USD 123,57 juta berasal dari Jerman, Irlandia, Italia, Norwegia, Qatar, Spanyol, Swedia, *Wallon and Brussels-Capital Regions of Belgium*;

- AFB kembali meluluskan akreditasi dari satu NIE, satu RIE (*Regional Implementing Entity*) dan satu MIE, pada periode pelaporan ini;
- Terlepas dari situasi Covid-19, persetujuan proyek dan program kumulatif meningkat sebesar 12% mencapai USD 831,49 juta (per 30 Juni 2021);
- Sebanyak 13 proposal proyek atau program yang diajukan oleh IE telah disetujui dengan total USD 64,2 juta yang terdiri dari 6 proposal yang diajukan oleh NIE dari Indonesia (4 proposal) dan Republik Tanzania (2 proposal) dengan total USD 11,5 juta. Selain itu, telah disetujui tujuh proposal lain yang diajukan oleh MIE dengan total USD 52,6 juta untuk Kamboja, Kamerun, Mesir, Gambia, Liberia, Republik Arab Suriah dan Zimbabwe;
- Sebanyak 3 proyek regional (*multi-country*) telah disetujui dengan pendanaan sebesar USD 27,4 juta;
- AFB telah menyetujui updated AF *gender policy and action plan*;
- Mengikuti keputusan COP, CMP dan Biro CMA untuk memperpanjang *membership of the Convention, Kyoto Protocol and Paris Agreement bodies* akibat penundaan COP26, AFB kemudian menyelaraskan posisi-posisi anggota dan anggota alternate AFB yang akan terbuka untuk pemilihan pada tahun 2021, akan berlanjut hingga 2022.

B.7. Global Environment Facility (GEF)

Global Environment Facility (GEF) merupakan *operating entity* dari mekanisme pendanaan iklim di bawah Konvensi. Hubungan antara COP dengan GEF tertuang di dalam MoU sebagaimana tercantum di *Decision 12/CP.12* dan juga *Decision 12/CP.3*. Berdasarkan MoU tersebut, GEF akan menerima arahan dari COP terutama dalam menjalankan peran sebagai entitas yang dipercaya untuk menjalankan mekanisme pendanaan dari Konvensi Perubahan Iklim, terutama yang terkait dengan kebijakan, prioritas program dan juga kriteria kelayakan untuk pendanaan.

Sesuai dengan Artikel 9 paragraf 8 dari Persetujuan Paris, serta *Decision 3/CMA.1* paragraf 7, GEF bersama dengan *Least Developed Countries Fund* (LCDF) dan *Special Climate Change Fund* (SCCF) yang juga dikelola oleh GEF, akan menerima arahan dari Konferensi Para Pihak dari Persetujuan Paris (CMA). COP sendiri menyatakan bahwa arahan kepada GEF diberikan sesuai dengan keputusan-keputusan COP, termasuk keputusan-keputusan yang telah disepakati sebelum Persetujuan Paris diadopsi, dan akan berlaku secara *mutatis mutandis*.

Sesuai dengan Persetujuan Paris sebagaimana tercantum dalam Artikel 9 paragraf 9, maka GEF juga diarahkan untuk memastikan akses yang efisien pada sumber-sumber pendanaan melalui adanya prosedur persetujuan yang disederhanakan (*simplified approval procedures*) serta dukungan kesiapan yang semakin ditingkatkan untuk negara-negara berkembang, khususnya bagi *Least Developed Countries* (LDCs) dan *Small Island Developing States* (SIDS). Dukungan tersebut harus disesuaikan dengan strategi serta rencana perubahan iklim nasional yang dimiliki oleh negara-negara tersebut.

B.7.1 Perkembangan dari GEF

Pada tahun 2020, GEF telah mengajukan laporan tahunannya kepada UNFCCC sebagai tanggapan GEF terhadap arahan yang diterima melalui COP dan CMA di Madrid akhir 2019 lalu. Tidak terlaksananya COP 26 di tahun 2020, membuat GEF kemudian melakukan pemutakhiran informasi dari laporannya di tahun 2020, sesuai dengan perkembangan GEF di tahun 2021. GEF melaporkan tanggapannya terkait dengan pandemi Covid-19, dimana terlepas dari adanya pandemi tersebut, GEF tetap meloloskan 98 proyek dan program yang diajukan ke GEF *Trust Fund* (GEF TF) dan 16 proyek dari pendanaan LDCF (*Least Developed Countries Fund*) di bulan

⁹ *Mutatis mutandis* di sini maksudnya adalah keputusan yang disepakati di COP sebelum adanya Persetujuan Paris tetap berlaku, kecuali bila dipandang perlu adanya perubahan yang diperlukan atau penting

Desember 2021 dan Juni 2021. GEF juga mengembangkan kerangka arahan yang telah membantu para pengaju proyek, dalam mengidentifikasi resiko dan kesempatan yang terkait dengan pandemi dan memasukkannya ke dalam rancangan project dan juga persiapannya.

Terkait dengan proses *replenishment* GEF yang ke-8 di tahun 2022, GEF telah memulai proses ini di awal tahun 2021 dan diharapkan selesai pada musim semi tahun 2022. Beberapa diskusi untuk mengembangkan GEF *Programming Strategy on Adaptation* yang termasuk di dalam pundi-pundi LCDF dan SCCF (*Special Climate Change Fund*), telah dilakukan pada pertemuan LDCF/SCCF Council di bulan Juni 2021. Kontribusi GEF terkait dengan *green and blue post Covid-19 recovery*, diharapkan dapat diartikulasikan di dalam dokumen-dokumen *Programming Strategy*.

GEF juga memberikan tanggapannya secara rinci, terkait dengan arahan-arahan yang diberikan oleh COP dan CMA kepada GEF. Secara lengkap tanggapan tersebut, dapat dilihat pada laporan GEF untuk COP yang tersedia di tautan berikut: *Report of the Global Environment Facility to the Conference of the Parties. Note by the secretariat (unfccc.int)*¹⁰.

B.8. Green Climate Fund (GCF)

Green Climate Fund (GCF) merupakan pendanaan iklim yang saat ini mencapai komitmen pendanaan terbesar, yaitu sekitar USD 10 miliar (GCF *first replenishment*, atau GCF-1, telah mengumpulkan sebesar USD 9,9 miliar¹¹). GCF dibentuk setelah Para Pihak menyetujui pembentukannya di COP 16, Cancun, melalui *Decision 1/CP.16*. GCF sendiri dibentuk sebagai salah satu mekanisme pendanaan di bawah Konvensi. Pengaturan hubungan antara GCF dan COP diatur di dalam *Decision 5/CP.19*.

¹⁰ Laporan tersebut dapat diakses melalui tautan berikut: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cp2020_01E.pdf

¹¹ *GCF report to the COP 2020*

GCF memiliki *Board* yang dipilih untuk menjalankan tata kelola GCF serta bertanggung jawab pada COP dan akan menerima arahan dari COP, terkait dengan dukungan yang diberikan oleh GCF terhadap proyek, program, kebijakan, dan aktivitas-aktivitas perubahan iklim lainnya yang berlangsung di negara-negara berkembang, melalui jendela pendanaan (*funding windows*) tematik yang ada.

Berdasarkan Artikel 9 paragraf 8 dari Persetujuan Paris, maka GCF juga akan menerima arahan dari Konferensi Para Pihak dari Persetujuan Paris (CMA). Konferensi Para Pihak dari Konvensi (COP) memutuskan bahwa arahan untuk badan-badan yang memiliki mandat untuk mengoperasikan mekanisme pendanaan dari Konvensi, sesuai dengan keputusan dari COP, termasuk yang telah disepakati sebelum Persetujuan Paris diadopsi akan berlaku *mutatis mutandis*¹².

Green Climate Fund juga sesuai dengan arahan dari Persetujuan Paris, Artikel 9 paragraf 9, diharuskan untuk memastikan adanya akses yang efisien kepada sumber-sumber pendanaan melalui prosedur-prosedur persetujuan yang sederhana (*simplified approval procedures*) dan juga untuk meningkatkan dukungan kesiapan bagi negara-negara berkembang, terutama bagi *Least Developed Countries* (LDCs) dan *Small Island Developing States* (SIDS), menyesuaikan dengan rencana dan strategi nasional mereka terkait dengan perubahan iklim.

B.8.1 Perkembangan GCF

Sesuai dengan mandatnya, *Green Climate Fund* (GCF) harus memberikan pertanggungjawabannya kepada Konferensi Para Pihak di bawah Konvensi Perubahan Iklim, terkait dengan mandat yang diberikan setiap tahunnya melalui agenda *Guidance to Green Climate Fund* (GCF). Pandemi Covid-19 menyebabkan laporan tahunan GCF untuk COP 26 tahun 2020, baru dibahas

¹² *GCF report to the COP 2020*

di tahun 2021, di mana GCF akan melaporkan kegiatannya selama tahun 2020 dan 2021. Walau demikian, sampai dengan penulisan panduan ini¹³, laporan GCF yang dapat diakses hanya memuat informasi terkait kinerja GCF di tahun 2020. Berikut ini adalah beberapa informasi yang tercantum di dalam laporan GCF kepada COP, di tahun 2020.

Pada laporannya, GCF melaporkan bahwa selama pandemi Covid-19, dampak terhadap operasional GCF sangat signifikan. GCF melakukan aksi-aksi untuk menanggapi pandemi tersebut, dengan tujuan untuk memastikan keamanan dari pegawai GCF dan keberlangsungan operasinya, serta untuk beradaptasi guna mengurangi dampak terhadap portfolio GCF dan dukungan kepada negara-negara berkembang dalam melakukan *green resilient recovery*. Hal ini dilakukan dengan cara memberlakukan tindakan-tindakan manajemen yang beradaptasi dengan keadaan, di mana fleksibilitas dan penyesuaian yang diperlukan di dalam implementasi dapat mendukung tindakan-tindakan *green resilient recovery*.

Laporan GCF kepada COP memberikan beberapa informasi per 16 November 2020 terkait dengan status pendanaan GCF hingga jumlah proposal yang disetujui, sebagai berikut:

- Status pendanaan iklim yang di-pledge mencapai USD 9,99 miliar;
- Jumlah proposal untuk meningkatkan kesiapan negara berkembang (*readiness proposal*) yang disetujui oleh GCF mencapai 390 proposal yang mencakup 139 negara, termasuk permohonan untuk mendukung rencana nasional untuk adaptasi (*National Adaptation Plans*) dan/atau proses perencanaan adaptasi lainnya. Besaran dana yang dikomitmenkan mencapai USD 266,51 juta dalam bentuk hibah atau dampingan teknis (*technical assistance*) untuk 388 permohonan;
- Permohonan untuk *Project Preparation Facility* (PPF) telah disetujui sebesar USD 23,4 juta, dimana USD 14,7 juta telah disalurkan;

¹³ Panduan ini ditulis pada tanggal 15 Oktober 2021

- Jumlah proposal pendanaan (*funding proposals*) yang disetujui adalah 159 proposal dengan total pendanaan GCF adalah USD 7,2 miliar, di mana sejumlah USD 16 miliar dalam bentuk *co-financing* diharapkan akan menyertai pendanaan GCF tersebut;
- GCF telah menyetujui 19 proyek *simplified approval process* (SAP) senilai USD 280 juta termasuk USD 170 juta berasal dari sumber-sumber GCF dan USD 109 juta dalam bentuk *co-financing*. Komposisi proyek yang disetujui adalah 12 proyek adaptasi, 3 proyek mitigasi dan 4 proyek *cross-cutting*.

GCF juga melaporkan bahwa GCF melanjutkan penyediaan pendanaan untuk kegiatan-kegiatan yang relevan untuk melakukan *averting, minimizing and addressing loss and damage*, konsisten dengan kerangka investasi dan jendela pendanaan serta struktur yang ada.

B.9. Keterkaitan Pendanaan Iklim dengan Agenda Lain

B.9.1 Artikel 6 Persetujuan Paris

Berdasarkan *Decision 1/CMP.14* dan *Decision 13/CMA.1*, Para Pihak bersepakat bahwa *Adaptation Fund* akan *serve Paris Agreement*, di mana *Adaptation Fund* akan mendapatkan arahan dari Konferensi Para Pihak dari Persetujuan Paris (*Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement* atau CMA). Hal ini berlaku efektif, terhitung pada 1 Januari 2019. Walau demikian, sampai *share of proceeds* dari Artikel 6.4 Persetujuan Paris tersedia, maka *Adaptation Fund* juga masih akan mendapatkan arahan dari Konferensi Para Pihak dari Protokol Kyoto¹⁴. Hal ini menyebabkan keberlanjutan dari *Adaptation Fund*, juga akan bergantung

¹⁴ *Decision 1/CMP.14* paragraf 2

pada hasil perundingan Artikel 6 Persetujuan Paris, terutama Artikel 6.4. Pada negosiasi Artikel 6 Persetujuan Paris sendiri, Artikel 6.4 bukan hanya satu-satunya cara yang diperhitungkan untuk berkontribusi pada pundi pendanaan *Adaptation Fund*. Beberapa negara berkembang (seperti negara-negara yang tergabung dalam kelompok LMDC) menyuarakan akan adanya *share of proceeds* yang berasal dari kegiatan-kegiatan terkait Artikel 6.2. Isu ini sudah digulirkan semenjak COP24 di Katowice pada tahun 2018 yang lalu. Walau demikian, masih banyak perdebatan terkait dengan hal ini, bahkan di COP25 Madrid tahun 2019 yang lalu. Adapun *share of proceeds* yang diusulkan oleh negara-negara seperti LMDC, melalui Artikel 6.2 adalah sebesar¹⁵ 5%.

B.9.2 Loss and Damage

Pada COP25, terdapat pembahasan terkait dengan pendanaan untuk *Loss and Damage*, yang menjadi tuntutan dari negara-negara berkembang kepada negara-negara maju. Agenda ini bermula dari pembahasan terkait dengan WIM (*Warsaw International Mechanism for Loss and Damage*), di mana negara-negara berkembang mengajukan pentingnya pendanaan untuk *loss and damage* yang bersifat *new and additional*. Hal ini diusulkan dengan menciptakan jendela pendanaan untuk *loss and damage* di bawah badan-badan pendanaan misalnya GCF. Beberapa negara maju kemudian menanggapi bahwa GCF sebenarnya telah menyediakan pendanaan yang berhubungan dengan *loss and damage*, seperti pendanaan untuk *early warning systems* dan infrastruktur untuk melindungi dari bencana banjir.

Agenda *loss and damage* merupakan salah satu agenda yang cukup pelik, sehingga penyelesaiannya diserahkan ke tingkat Menteri pada saat itu. Salah satu agenda yang menjadi fokus dari pembahasan ini adalah bagaimana WIM

¹⁵ 2018. IISD Reporting Services. *Earth Negotiation Bulletin: Summary Report of the Katowice Climate Change Conference: 2-15 December 2018*

ExCom dapat bekerja sama dengan *Standing Committee on Finance* (SCF) untuk memobilisasi lebih lanjut akses pendanaan untuk *loss and damage*.

Negara berkembang terus menerus menyampaikan bahwa pendanaan terkait dengan *loss and damage* harus disediakan oleh negara-negara maju. Uruguay dan Malaysia atas nama LMDC (*Like Minded Developing Countries*), menekankan bahwa pendanaan untuk *loss and damage*, termasuk melalui GCF, harus menjadi dana tambahan dari pendanaan untuk adaptasi perubahan iklim.

Para Pihak pada akhirnya menyepakati bahwa perlu adanya interaksi antara WIM ExCom dengan SCF, terkait dengan peran ExCom untuk memberikan masukan pada proses persiapan SCF untuk memberikan arahan pada operating entities dari mekanisme pendanaan di bawah Konvensi dan Persetujuan Paris. Selain itu, disepakati juga perlunya kolaborasi antara ExCom dengan GCF untuk menjelaskan bagaimana negara-negara berkembang dapat mengakses pendanaan GCF dalam pengembangan proposal pendanaan yang berhubungan dengan rencana kerja dari ExCom, termasuk untuk memasukkan informasi yang ada di dalam laporan tahunan dari ExCom.

B.9.3 Kerangka Transparansi (*Transparency Framework*)

Keterkaitan isu pendanaan iklim dengan kerangka transparansi menyangkut penyusunan panduan untuk kerangka transparansi, terutama dari segi penyediaan dukungan bagi negara-negara berkembang dalam mencapai target-target negara mereka masing-masing. Artikel 9.7 dari Persetujuan Paris menyebutkan tentang keterkaitan antara pendanaan iklim dengan isu kerangka transparansi.

“

Developed country Parties shall provide transparent and consistent information on support for developing country Parties provided and mobilized through public interventions biennially in accordance with the modalities, procedures and guidelines to be adopted by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement, at its first session, as stipulated in Article 13, paragraph 13. Other Parties are encouraged to do so.

Artikel 9.7, Persetujuan Paris

”

“

The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement shall, at its first session, building on experience from the arrangements related to transparency under the Convention, and elaborating on the provisions in this Article, adopt common modalities, procedures and guidelines, as appropriate, for the transparency of action and support.

Artikel 13.13, Persetujuan Paris

”

Pada agenda pembahasan terkait dengan kerangka transparansi yang akan dilakukan di CMA3 mendatang, isu transparansi yang dikembangkan berdasarkan MPGs (*Modalities, Procedures, and Guidelines*) yang sudah disepakati di Katowice, akan kembali dibahas. Terutama yang terkait dengan *common tabular format* dan *common reporting format*. Agenda ini membahas mengenai rincian laporan seperti apa yang akan diterapkan terkait dengan aliran pendanaan.

C. Tautan Dokumen Pendukung, Agenda Pembahasan Negosiasi Pendanaan Iklim



Bagian ini memuat tautan dokumen pendukung dari agenda negosiasi pendanaan iklim di Glasgow pada tanggal 31 Oktober 2021 – 12 November 2021 mendatang. Bagian B dari panduan ini merupakan rangkuman mengenai latar belakang isu yang termasuk di dalam agenda negosiasi pendanaan iklim. Dokumen lengkap dari isu-isu pendanaan iklim yang akan dibahas di Glasgow mendatang, dapat diakses melalui tautan yang disampaikan di bagian ini.

Body	Agenda	Weblink
COP26	Long-Term Finance	<p>FCCC/CP/2019/4 <i>In-session workshop on long-term climate finance in 2019. Summary report by the secretariat</i></p> <p>FCCC/CP/2019/7, <i>Third biennial high-level ministerial dialogue on climate finance: translating climate finance needs into action. Note by the President</i></p> <p>FCCC/CP/2019/INF.1, <i>Biennial submissions from developed country Parties on their updated strategies and approaches for scaling up climate finance from 2014 to 2020. Compilation and synthesis report by the secretariat</i></p> <p>FCCC/CP/2021/6, <i>In-session workshop on long-term climate finance in 2020. Summary report by the secretariat</i></p> <p>Further information: https://unfccc.int/topics/climate-finance/workstreams/long-term-climate-finance-ltf</p>
COP26	Standing Committee on Finance	<p>FCCC/CP/2020/4– FCCC/PA/CMA/2020/3, <i>Report of the Standing Committee on Finance</i></p> <p>FCCC/CP/2021/10– FCCC/PA/CMA/2021/7, <i>Report of the Standing Committee on Finance</i></p> <p>Further information: https://unfccc.int/SCF https://unfccc.int/documents/302688 https://unfccc.int/process-and-meetings/bodies/election-and-membership</p>
COP26	Report of the GCF to the COP and guidance to the GCF (for 2020 and 2021)	<p>FCCC/CP/2020/5, <i>Report of the Green Climate Fund to the Conference of the Parties. Note by the secretariat</i></p> <p>FCCC/CP/2021/8, <i>Report of the Green Climate Fund to the Conference of the Parties. Note by the secretariat</i></p>

Body	Agenda	Weblink
		<p>FCCC/CP/2020/INF.1, <i>Operation of the registry of nationally appropriate mitigation actions. Report by the secretariat</i></p> <p>FCCC/CP/2021/INF.1, <i>Operation of the registry of nationally appropriate mitigation actions. Report by the secretariat</i></p> <p>Draft report by the COP 25 Presidency to COP 26 on GCF privileges and immunities, https://unfccc.int/documents/267638</p> <p>Further information, https://unfccc.int/process/bodies/funds-and-financial-entities/green-climate-fund</p>
COP26	Report of the Global Environment Facility to the Conference of the Parties and guidance to the Global Environment Facility (for 2020 and 2021)	<p>FCCC/CP/2020/1, <i>Report of the Global Environment Facility to the Conference of the Parties</i></p> <p>FCCC/CP/2020/1 and Add.1, <i>Report of the Global Environment Facility to the Conference of the Parties. Note by the secretariat</i></p> <p>FCCC/CP/2021/9 and Add.1, <i>Report of the Global Environment Facility to the Conference of the Parties. Note by the secretariat</i></p> <p>FCCC/CP/2020/INF.1, <i>Operation of the registry of nationally appropriate mitigation actions. Report by the secretariat</i></p> <p>FCCC/CP/2021/INF.1, <i>Operation of the registry of nationally appropriate mitigation actions. Report by the secretariat</i></p> <p>Further information: https://unfccc.int/topics/climate-finance/funds-entities-bodies/global-environment-facility</p>
COP26	Seventh review of the Financial Mechanism	<p>Further information: https://unfccc.int/topics/climate-finance/workstreams/review-of-the-financial-mechanism</p>
COP26	Compilation and synthesis of, and summary report on the in-session workshop on, biennial	<p>FCCC/PA/CMA/2021/3, <i>First biennial communications in accordance with Article 9, paragraph 5, of the Paris Agreement. Compilation and synthesis by the secretariat</i></p>

Body	Agenda	Weblink
	communications of information related to Article 9, paragraph 5, of the Paris Agreement	FCCC/PA/CMA/2021/5, In-session workshop on information to be provided by Parties in accordance with Article 9, paragraph 5, of the Paris Agreement. Summary report by the secretariat Biennial communications, https://unfccc.int/Art.9.5-biennial-communications Further information, https://unfccc.int/topics/climate-finance/workstreams/ex-ante-climate-finance-information-post-2020-article-95-of-the-paris-agreement
CMP16	Report of the Adaptation Fund Board (for 2020 and 2021)	FCCC/KP/CMP/2021/2–FCCC/PA/CMA/2021/4 and Add.1, Report of the Adaptation Fund Board. Note by the Chair of the Adaptation Fund Board FCCC/KP/CMP/2020/2–FCCC/PA/CMA/2020/2, Report of the Adaptation Fund Board. Note by the Chair of the Adaptation Fund Board Further information, https://unfccc.int/Adaptation-Fund dan https://unfccc.int/process-and-meetings/bodies/election-and-membership
CMP16	Fourth review of the Adaptation Fund	
CMA3	Standing Committee on Finance	FCCC/CP/2020/4–FCCC/PA/CMA/2020/3, Report of the Standing Committee on Finance FCCC/CP/2021/10–FCCC/PA/CMA/2021/7, Report of the Standing Committee on Finance Further information, https://unfccc.int/SCF dan https://unfccc.int/documents/302688
CMA3	Guidance to the Green Climate Fund	FCCC/CP/2020/5, Report of the Green Climate Fund to the Conference of the Parties. Note by the secretariat FCCC/CP/2021/8, Report of the Green Climate Fund to the Conference of the Parties. Note by the secretariat Further information, https://unfccc.int/process/bodies/funds-and-financial-entities/green-climate-fund
CMA3	Guidance to the Global Environment Facility	FCCC/CP/2020/1, Report of the Global Environment Facility to the Conference of the Parties

Body	Agenda	Weblink
		FCCC/CP/2020/1 and Add.1, Report of the Global Environment Facility to the Conference of the Parties. Note by the secretariat FCCC/CP/2021/9 and Add.1, Report of the Global Environment Facility to the Conference of the Parties. Note by the secretariat Further information, https://unfccc.int/topics/climate-finance/funds-entities-bodies/global-environment-facility
CMA3	Matters relating to the Adaptation Fund	FCCC/KP/CMP/2020/2–FCCC/PA/CMA/2020/2, Report of the Adaptation Fund Board. Note by the Chair of the Adaptation Fund Board FCCC/KP/CMP/2021/2–FCCC/PA/CMA/2021/4 and Add.1, Report of the Adaptation Fund Board. Note by the Chair of the Adaptation Fund Board Further information, https://unfccc.int/Adaptation-Fund
CMA3	New collective quantified goal on climate finance	FCCC/PA/CMA/2021/3, First biennial communications in accordance with Article 9, paragraph 5, of the Paris Agreement. Compilation and synthesis by the secretariat FCCC/PA/CMA/2021/5, In-session workshop on information to be provided by Parties in accordance with Article 9, paragraph 5, of the Paris Agreement. Summary report by the secretariat Biennial communications, https://unfccc.int/Art.9.5-biennial-communications Further information, https://unfccc.int/topics/climate-finance/workstreams/ex-ante-climate-finance-information-post-2020-article-95-of-the-paris-agreement
SBI 52-55	Membership of the Adaptation Fund Board	https://unfccc.int/Adaptation-Fund
SBI 52-55	Fourth review of the Adaptation Fund	https://unfccc.int/Adaptation-Fund https://unfccc.int/topics/climate-finance/funds-entities-bodies/adaptation-fund/submissions-related-to-the-fourth-review-of-the-adaptation-fund

Lampiran A. Pedoman Review Mekanisme Pendanaan Iklim, Sesuai dengan *Decision 12/22*

Lampiran A ini merupakan bagian Annex dari Decision 12/22, dan merupakan dokumen awal untuk dipertimbangkan Para Pihak, dalam memulai proses review mekanisme pendanaan iklim Konvensi yang ketujuh. Para Pihak, melalui agenda ini, akan menentukan aspek-aspek apa saja yang harus dipertimbangkan di dalam melakukan review mekanisme pendanaan Konvensi yang ketujuh.

Updated Guidelines for The Sixth Review of The Financial Mechanism

A. Objectives

1. *In accordance with Article 11, paragraph 4, of the Convention, the objectives of the sixth review of the Financial Mechanism will be as follows:*
 - (a) *To review the Financial Mechanism and take appropriate measures regarding:*
 - (i) *Its conformity with the provisions of Article 11 of the Convention and the guidance provided by the Conference of the Parties (COP);*
 - (ii) *The effectiveness of the activities it funds in implementing the Convention;*
 - (iii) *Its effectiveness in providing financial resources on a grant or concessional basis, including for the transfer of technology, for the implementation of the Convention's objective on the basis of the guidance provided by the COP;*
 - (iv) *Its effectiveness in providing resources to developing country Parties under Article 4, paragraph 3, of the Convention;*
 - (v) *The effectiveness of access modalities for developing countries;*
 - (b) *To examine consistency and complementarity between the operating entities of the Financial Mechanism, and between the operating entities of the Financial Mechanism and other sources of investment and financial flows, including:*

- (i) *Examining relevant sources, channels and means of financing, as indicated in Article 11, paragraph 5, of the Convention, that would assist developing country Parties to contribute to the achievement of the objective of the Convention, in particular innovative means of financing, such as for the development of endogenous technologies in developing countries;*
- (ii) *Examining the role of the Financial Mechanism in scaling up the level of resources;*
- (iii) *Assessing enabling environments for catalysing investment in, and the transfer of, environmentally sound technologies that mitigate greenhouse gas emissions, and for enhancing resilience to climate change.*

B. Sources of Information

2. *The review shall draw upon, inter alia, the following sources of information:*
 - (a) *Information provided by Parties on their experiences regarding financial support provided and received in accordance with COP decisions;*
 - (b) *Annual guidance provided by the COP to the operating entities of the Financial Mechanism with regard to the conformity of their activities with the guidance provided by the COP;*
 - (c) *The annual reports of the Standing Committee on Finance (SCF) to the COP on its activities and relevant technical information produced by the committee such as the biennial assessments and overview of climate finance flows and outcomes of the SCF forums;*
 - (d) *The annual reports of the Global Environment Facility (GEF) to the COP on its activities as an operating entity of the Financial Mechanism, including the information on the Least Developed Countries Fund and the Special Climate Change Fund, and other relevant GEF policy and information documents;*
 - (e) *The reports from the GEF Independent Evaluation Office;*

- (f) *The annual reports of the Board of the Green Climate Fund (GCF) to the COP on its activities as an operating entity of the Financial Mechanism and other relevant GCF policy and information documents;*
- (g) *The reports of the Adaptation Fund Board to the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties of the Kyoto Protocol and other outcomes of the reviews of the Adaptation Fund;*
- (h) *The outcomes and reports of the United Nations processes, relevant bilateral and multilateral funding institutions and other intergovernmental and non-governmental organizations dealing with climate financing;*
- (i) *Relevant reports on private-sector financing and investment for climate change activities;*
- (j) *Technical papers and reports prepared by the secretariat at the request of the COP which are relevant to the financial needs of developing country Parties under the Convention;*
- (k) *Information contained in the national communications of Parties to the Convention, technology needs assessments and national adaptation programmes of action;*
- (l) *The reports of the in-session workshops on long-term finance;*
- (m) *The biennial submissions from developed country Parties on their updated strategies and approaches for scaling up climate finance from 2014 to 2020, including any available information on quantitative and qualitative elements of a pathway;*
- (n) *The reports of the Least Developed Countries Expert Group and the Consultative Group of Experts on National Communications from Parties not included in Annex I to the Convention.*

C. Criteria

3. *The effectiveness of the Financial Mechanism will be assessed taking into account the following:*

- (a) *The transparency of the decision-making processes of the operating entities of the Financial Mechanism;*
- (b) *The level of stakeholder involvement;*
- (c) *The extent to which the Financial Mechanism is contributing to gender-sensitive approaches;*
- (d) *The adequacy and predictability, accessibility and timeliness and rate of disbursement of funds for activities in developing country Parties, including projects in the pipeline;*
- (e) *The responsiveness, efficiency and performance of the cycle for project/programme approval procedures of the operating entities of the Financial Mechanism;*
- (f) *The amount of resources provided to developing country Parties, including financing for technical assistance and investment projects, and the mechanisms for country allocation, as well as the results and impacts achieved by the resources provided;*
- (g) *The amount of finance leveraged, and modalities and ratios of co-financing and the use of financial instruments where applicable;*
- (h) *The extent to which the resources provided are contributing to achieving the objective of the Convention;*
- (i) *The sustainability of funded programmes, projects and operations in developing country Parties;*
- (j) *The extent to which the Financial Mechanism is contributing to the country ownership of programmes and projects.*



Equity Tower Building Lt. 37, SCBD
Senayan, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta - 12190

  Indonesia Research Institute for Decarbonization

  irid_ind